



VOLUNTARY GUIDELINES FOR SECURING SUSTAINABLE SMALL-SCALE FISHERIES IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY AND POVERTY ERADICATION

**Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil
yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan
Pengentasan Kemiskinan**



**Voluntary Guidelines for Securing Sustainable
Small-scale Fisheries in the Context of
Food Security and Poverty Eradication**

**Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala
kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan
Pangan dan Pengentasan Kemiskinan**

Diterjemahkan oleh:

Tim Penterjemah Ditjen Perikanan Tangkap T.A. 2014

**Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2014**

The Designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Penunjukan yang digunakan dan penyajian materi dalam produk informasi ini tidak menyatakan sesuatu pendapat apapun dari pihak *the Food and Agriculture Organization of the United Nations* berkenaan dengan status hukum suatu negara, wilayah/teritori, kota atau kawasan dari otoritasnya, atau yang berkenaan dengan batas dari garis perbatasan atau sempadannya.

All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for educational or other non-commercial purposes are authorized without any prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the copyright holders. Applications for such permission should be addressed to Chief of Electronic Publishing Policy and Support Branch, Communication Division, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy or by e-mail to copyright@fao.org

Hak dilindungi. Reproduksi dan diseminasi dari material dalam produk informasi untuk pendidikan atau tujuan non-komersial diotorisasi tanpa izin sebelumnya dari pemegang hak cipta yang menyediakan sumber informasi adalah diakui sepenuhnya. Reproduksi dari material dalam produk informasi untuk tujuan penjualan kembali atau tujuan komersial lainnya adalah dilarang tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengajuan untuk izin semacam itu harus dialamatkan kepada *Chief Electronic Publishing Policy and Support Branch, Communication Division, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy* atau melalui e-mail kepada copyright@fao.org



KATA PENGANTAR

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan ini merupakan hasil terjemahan dari *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*, yang merupakan Petunjuk Pelengkap dari Tata Laksana Untuk Perikanan Yang Bertanggungjawab atau *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang telah diadopsi oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1995.

Setelah diadopsinya CCRF, berbagai macam *International Plan of Action* (IPOA), antara lain: *IPOA on IUU Fishing*, *IPOA for the Management of Fishing Capacity* dan *IPOA for the Conservation and Management of Sharks* serta berbagai *Technical Guidelines* yang merupakan petunjuk turunan dari CCRF telah berhasil disahkan dalam berbagai sidang FAO dan diadopsi oleh negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Selanjutnya, setelah lebih dari 1 (satu) dekade dari terbitnya CCRF, salah satu substansi mendasar yang merupakan mandat CCRF terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari perikanan skala kecil akhirnya dapat disepakati oleh negara-negara anggota FAO, berupa disahkannya Petunjuk Sukarela ini sebagai pedoman internasional untuk menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan.

Secara umum karakteristik perikanan skala kecil di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang adalah sangat spesifik dan merupakan sumber penghidupan sebagian besar nelayan. Hal ini berbeda dengan perikanan skala kecil yang ada di negara-negara maju yang lebih memandang perikanan skala kecil dari sisi skala usaha atau ekonomi. Mengingat kontribusi perikanan skala kecil yang penting namun belum sepenuhnya ditangani oleh FAO, Indonesia melalui Delegasi Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang mewakili Pemerintah dalam berbagai sidang dan forum internasional yang diselenggarakan oleh FAO maupun forum regional yang diselenggarakan oleh organisasi perikanan regional sejak **tahun 2003** telah berulang kali menyuarakan pentingnya FAO untuk segera mengangkat isu perikanan skala kecil, antara lain, melalui penyusunan Pedoman Internasional yang dapat melindungi dan memberdayakan perikanan skala kecil.

Dalam perkembangannya, pada **tahun 2008**, FAO bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi perikanan *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC, beranggotakan 11 negara termasuk Indonesia) dan *The WorldFish Center* telah menyelenggarakan pertemuan *the Global Conference on Small-Scale Fisheries—Securing Sustainable Small-Scale Fisheries: Bringing together responsible fisheries and social development* di Bangkok, Thailand. Konferensi ini mempertegas pendapat tentang perikanan skala kecil yang belum sepenuhnya disadari potensinya dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)*. Delegasi Indonesia yang hadir pada konferensi ini juga menyerukan perlunya sebuah instrumen internasional mengenai perikanan skala kecil.

Pada Sidang *Committee of Fisheries (COFI)* ke-28 pada **tahun 2009**, Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kembali perlunya sebuah instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil. Pada sidang tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan kepada FAO untuk memberikan perhatian khusus pada perikanan skala kecil, termasuk agar FAO membentuk *Sub Committee* yang dapat menangani isu-isu perikanan skala kecil secara khusus.

Menanggapi tuntutan anggotanya, FAO pada **bulan Oktober 2010** menyelenggarakan 3 (tiga) kali workshop regional untuk wilayah Afrika, Asia dan Pasifik, serta Amerika Latin dan Karibia yang ditujukan sebagai forum konsultasi antara FAO dengan para pemangku kepentingan nasional dan regional, baik dari kalangan pemerintah dan masyarakat sipil. Konsultasi tersebut secara spesifik mengidentifikasi berbagai praktek tata kelola perikanan skala kecil yang berkelanjutan serta untuk mendapatkan pandangan mengenai bagaimana perikanan skala kecil tersebut dapat didukung secara formal. Selanjutnya, pada sidang COFI ke-29 yang diselenggarakan pada **bulan Februari 2011**, FAO dan para anggotanya

menyepakati perlunya disusun instrumen internasional tentang perikanan skala kecil. Hal ini juga didorong dari meningkatnya pengakuan dunia terhadap perikanan skala kecil sebagai kontributor penting dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Sebagai langkah selanjutnya pada **tahun 2012**, FAO menerbitkan the *'Zero Draft' of the International Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries (SSF Guidelines)* yang merupakan hasil proses konsultasi ekstensif yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir. *Zero Draft* merupakan draft awal yang disiapkan oleh Tim *FAO SSF Guidelines Secretariat* dan diadopsi pada *FAO Workshop on International Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries* pada **tanggal 7-10 Februari 2012** di FAO, Roma.

Pada **tanggal 20 s.d. 24 Mei 2013**, FAO menyelenggarakan pertemuan *Technical Consultation on International Guidelines for Security Sustainable Small Scale Fisheries* yang dilaksanakan di Roma, Italia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menegosiasikan *Zero Draft International Guideline for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication* yang telah disusun sebagaimana disebutkan di atas. Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewakili Pemerintah Indonesia dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional yang nantinya diharapkan dapat turut mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan tersebut. Posisi Indonesia pada pertemuan ini dituangkan kedalam "*Indonesia Communication Paper*" dan disirkulasikan selama pertemuan tersebut berlangsung. Posisi Indonesia tersebut mengakomodasi kepentingan perikanan skala kecil nasional yang mencakup isu ekonomi, sosial, yuridis dan ekosistem, yang telah disusun oleh Kementerian Kelautan Perikanan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

Selanjutnya pada **tanggal 2-6 Desember 2013**, pada Sidang *FAO Council ke-148*, Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan intervensi yang merupakan perhatian dan dukungan Indonesia, khususnya KKP dalam percepatan penyelesaian *FAO Technical Consultation on International Guideline for Securing Small Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*, yang berpihak kepada nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir. Petunjuk ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia memiliki lebih dari 90% nelayan skala kecil.

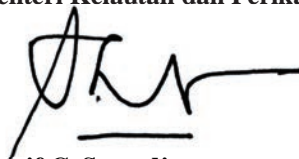
Akhirnya pada pertemuan *FAO Resumed Session of the Technical Consultation* yang dilaksanakan **tanggal 3 s.d. 7 Februari 2014**, di Roma Italia, dan dihadiri oleh delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, draft final *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication* telah secara resmi disepakati untuk disahkan pada Sidang *FAO Council* ke-149 pada **bulan Juni tahun 2014**. Disahkannya petunjuk ini pada Sidang *FAO Council* tersebut merupakan salah satu pencapaian penting dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memperjuangkan terbitnya petunjuk ini selama lebih dari 1 (satu) dekade sejak awal tahun 2000-an. Meskipun bersifat sukarela, namun semua negara baik anggota maupun bukan anggota FAO serta organisasi internasional yang berkaitan dengan sektor perikanan diharapkan dapat menjadikan Petunjuk Sukarela ini sebagai acuan untuk menjamin dan meningkatkan peran perikanan skala kecil dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan suatu negara.

Buku terjemahan ini merupakan edisi perdana yang masih perlu untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan sosialisasinya pada seluruh pemangku kepentingan perikanan di Indonesia. Oleh karenanya, saran yang konstruktif untuk perbaikan kedepannya amat diharapkan.

Atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak selama proses penerjemahan buku ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2014

Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.



Sharif C. Sutardjo

TABLE OF CONTENTS

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS.....	viii
PREFACE.....	ix
PART 1: INTRODUCTION.....	1
1. OBJECTIVES	1
2. NATURE AND SCOPE	2
3. GUIDING PRINCIPLES	3
4. RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL INSTRUMENTS	6
PART 2: RESPONSIBLE FISHERIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.....	7
5. GOVERNANCE OF TENURE AND RESOURCE MANAGEMENT.....	7
5A. Responsible governance of tenure.....	7
5B. Sustainable resource management.....	10
6. SOCIAL DEVELOPMENT, EMPLOYMENT AND DECENT WORK	12
7. VALUE CHAINS, POST-HARVEST AND TRADE	17
8. GENDER EQUALITY	20
9. DISASTER RISKS AND CLIMATE CHANGE	21
PART 3: ENSURING AN ENABLING ENVIRONMENT AND SUPPORTING IMPLEMENTATION.....	23
10. POLICY COHERENCE, INSTITUTIONAL COORDINATION AND COLLABORATION	23
11. INFORMATION, RESEARCH AND COMMUNICATION.....	25
12. CAPACITY DEVELOPMENT.....	28
13. IMPLEMENTATION SUPPORT MONITORING AND EVALUATION	29

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN AKRONIM	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAGIAN 1: PENDAHULUAN.....	1
1. TUJUAN.....	1
2. SIFAT DAN RUANG LINGKUP.....	2
3. PRINSIP-PRINSIP PETUNJUK.....	3
4. HUBUNGAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL LAINNYA.....	6
BAGIAN 2: PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	7
5. TATA KELOLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	7
5A. Tata kelola kepemilikan yang bertanggung jawab.....	7
5B. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.....	10
6. PEMBANGUNAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBANGUNAN YANG LAYAK	12
7. RANTAI NILAI, PASKA PANEN DAN PERDAGANGAN	17
8. KESETARAAN GENDER.....	20
9. RESIKO BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	21
BAGIAN 3: MEMASTIKAN LINGKUNGAN PENUNJANG DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN	23
10. KEBIJAKAN YANG KOHERAN, KOLABORASI DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN.....	23
11. INFORMASI, PENELITIAN DAN KOMUNIKASI	25
12. PENGEMBANGAN KAPASITAS.....	28
13. DUKUNGAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI	29

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

CCA	Climate Change Adaptation
CCRF	Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO)
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CFS	Committee on World Security
CSOs	Civil Society Organizations
DRM	Disaster risk management
EAF	Ecosystem approach to fisheries
HIV/AIDS	Human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
IGO	Intergovernmental Organization
ILO	International Labour Organization
IMO	International Maritime Organization
IUU (fishing)	Illegal, unreported and unregulated (fishing)
MCS	Monitoring, control and surveillance
NGO	Non-governmental Organization
RFB	Regional Fishery Body
Rio+20	United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)
SSF	Small-Scale Fisheries
UN	United Nations
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WTO	World Trade Organization

SINGKATAN DAN AKRONIM

CCA	Adaptasi Perubahan Iklim
CCRF	Tata Laksana Untuk Perikanan Yang Bertanggungjawab
CEDAW	Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
CFS	Komisi Keselamatan Dunia
CSOs	Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil
DRM	Manajemen Risiko Bencana
EAF	Pendekatan Ekosistem Perikanan
HIV/AIDS	Virus Penyebab Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh / Gejala Melemahnya Sistem Kekebalan Tubuh
ICESCR	Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
IGO	Organisasi Antar Pemerintah
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional
IMO	Organisasi Maritim Internasional
IUU (fishing)	Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur
MCS	Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan
NGO	Organisasi Non Pemerintah
RFB	Organisasi Perikanan Regional
Rio+20	Konferensi PPB Tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20)
SSF	Perikanan Skala Kecil
UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim
WTO	Organisasi Perdagangan Dunia

PREFACE

These *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication* have been developed as a complement to the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). They were developed to provide complementary guidance with respect to small-scale fisheries in support of the overall principles and provisions of the CCRF. Accordingly, the Guidelines are intended to support the visibility, recognition and enhancement of the already important role of small-scale fisheries and to contribute to global and national efforts towards the eradication of hunger and poverty. The Guidelines support responsible fisheries and sustainable social and economic development for the benefit of current and future generations, with an emphasis on small-scale fishers and fish workers and related activities and including vulnerable and marginalized people promoting a human rights-based approach.

It is emphasized that these Guidelines are voluntary, global in scope and with a focus on the needs of developing countries.

Small-scale and artisanal fisheries, encompassing all activities along the value chain – pre-harvest, harvest and post-harvest – undertaken by men and women, play an important role in food security and nutrition, poverty eradication, equitable development and sustainable resource utilization. Small-scale fisheries provide nutritious food for local, national and international markets and generate income to support local and national economies.

Small-scale fisheries contribute about half of global fish catches. When considering catches destined for direct human consumption, the share contributed by the subsector increases to two-thirds. Inland fisheries are particularly important in this respect and small-scale fisheries food production dominates the subsector. Small-scale fisheries employ more than 90 percent of the world's capture fishers and fish workers, about half of whom are women. In addition to employment as full-or part-time fishers and fish workers, seasonal or occasional fishing and related

KATA PENGANTAR

Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan telah dikembangkan sebagai pelengkap dari Tata Laksana Untuk Perikanan Yang Bertanggungjawab (CCRF) yang diterbitkan FAO pada tahun 1995. Petunjuk ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Oleh karena itu, Petunjuk ini dimaksudkan untuk mendukung visibilitas, pengakuan dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil yang berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global menuju pengentasan kelaparan dan kemiskinan. Petunjuk ini mendukung perikanan yang bertanggungjawab dan pengembangan sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan skala kecil dan buruh nelayan dan kegiatan-kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan termarjinalkan dengan mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM).

Ditekankan bahwa Petunjuk ini bersifat sukarela, memiliki ruang lingkup global dengan sebuah fokus pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Perikanan skala kecil dan artisanal, meliputi seluruh kegiatan-kegiatan dari mata rantai – pra-panen, panen dan setelah panen – yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, berperan penting dalam ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Perikanan Skala kecil menjadi sumber pangan yang bergizi untuk pasar lokal, nasional dan internasional serta menghasilkan pendapatan dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Perikanan Skala kecil menyumbang separuh dari hasil tangkapan ikan global. Ketika mempertimbangkan hasil-hasil tangkapan yang diperuntukkan secara langsung untuk konsumsi manusia, maka bagian yang disumbangkan oleh sub sektor ini meningkat menjadi dua-pertiganya. Perikanan pedalaman secara khusus penting dalam hal ini dan produksi perikanan skala kecil mendominasi sub sektor tersebut. Perikanan Skala kecil memperkerjakan lebih dari 90 persen nelayan dan buruh nelayan di dunia, sekitar setengahnya adalah wanita. Selain itu, pekerjaan sebagai

activities provide vital supplements to the livelihoods of millions. These activities may be a recurrent sideline activity or become especially important in times of difficulty. Many small-scale fishers and fish workers are self-employed and engaged in directly providing food for their household and communities as well as working in commercial fishing, processing and marketing. Fishing and related activities often underpin the local economies in coastal, lakeshore and riparian communities and constitute an engine, generating multiplier effects in other sectors.

Small-scale fisheries represent a diverse and dynamic subsector, often characterized by seasonal migration. The precise characteristics of the subsector vary depending on the location; indeed, smallscale fisheries tend to be strongly anchored in local communities, reflecting often historic links to adjacent fishery resources, traditions and values, and supporting social cohesion. For many small-scale fishers and fish workers, fisheries represent a way of life and the subsector embodies a diversity and cultural richness that is of global significance. Many small-scale fishers, fish workers and their communities – including vulnerable and marginalized groups – are directly dependent on access to fishery resources and land. Tenure rights to land in the coastal/waterfront area are critical for ensuring and facilitating access to the fishery, for accessory activities (including processing and marketing), and for housing and other livelihood support. The health of aquatic ecosystems and associated biodiversity are a fundamental basis for their livelihoods and for the subsector’s capacity to contribute to overall well-being.

Despite their importance, many small-scale fishing communities continue to be marginalized, and their contribution to food security and nutrition, poverty eradication, equitable development and sustainable resource utilization – which benefits both them and others – is not fully realized.

nelayan dan buruh nelayan penuh dan paruh waktu, kegiatan penangkapan ikan secara musiman atau sementara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dapat memberikan suplemen penting bagi sumber penghidupan jutaan manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut mungkin menjadi kegiatan sampingan yang terus menerus atau menjadi sangat penting pada masa paceklik. Banyak nelayan-nelayan skala kecil dan buruh nelayan bekerja secara mandiri dan terlibat secara langsung dalam menyediakan pangan bagi keluarganya dan masyarakat maupun bekerja untuk penangkapan ikan komersial, pengolahan dan pemasaran. Kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya kerap menjadi pendukung ekonomi lokal bagi masyarakat pesisir, tepi danau serta tepi sungai dan merupakan alat, yang menghasilkan efek berantai bagi sektor lain.

Perikanan skala kecil mewakili sebuah sub sektor yang beragam dan dinamis, sering ditandai dengan kegiatan migrasi musiman. Karakteristik yang tepat dari sub sektor ini bervariasi bergantung pada lokasi; sesungguhnya perikanan skala kecil cenderung menjadi kuat mengakar pada masyarakat lokal, yang mencerminkan hubungan sejarah dengan sumber daya perikanan, tradisi dan nilai-nilai, serta mendukung keterpaduan sosial. Bagi para nelayan skala kecil dan buruh nelayan, perikanan mewakili sebuah cara hidup dan sub sektor yang mewujudkan keragaman dan kekayaan budaya yang penting secara global. Banyak nelayan skala kecil, buruh nelayan dan masyarakatnya – termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan termarginalkan – yang secara langsung bergantung pada akses terhadap sumber daya perikanan dan lahan. Hak kepemilikan lahan di wilayah pesisir / pantai sangat penting untuk menjamin dan memfasilitasi akses ke perikanan, untuk kegiatan tambahan (termasuk pengolahan dan pemasaran), dan untuk perumahan dan dukungan mata pencaharian lainnya. Kesehatan ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati adalah dasar fundamental bagi sumber penghidupannya dan untuk kapasitas subsektor yang berkontribusi bagi kesejahteraan secara keseluruhan.

Meskipun penting, banyak masyarakat nelayan skala kecil terus terpinggirkan, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan - yang menguntungkan baik bagi mereka dan yang lain - tidak sepenuhnya disadari.

Securing and increasing the contribution of small-scale fisheries face many challenges and constraints. The development of the fisheries sector over the past three to four decades has in many cases around the world led to overexploitation of resources and threats to habitats and ecosystems. Customary practices for the allocation and sharing of resource benefits in small-scale fisheries, which may have been in place for generations, have been changed as a result of non-participatory and often centralized fisheries management systems, rapid technology developments and demographic changes. Small-scale fishing communities also commonly suffer from unequal power relations. In many places, conflicts with large-scale fishing operations are an issue, and there is increasingly high interdependence or competition between small-scale fisheries and other sectors. These other sectors can often have stronger political or economic influence, and they include: tourism, aquaculture, agriculture, energy, mining, industry and infrastructure developments.

Where poverty exists in small-scale fishing communities, it is of a multidimensional nature and is not only caused by low incomes but also due to factors that impede full enjoyment of human rights including civil, political, economic, social and cultural rights. Small-scale fishing communities are commonly located in remote areas and tend to have limited or disadvantaged access to markets, and may have poor access to health, education and other social services. Other characteristics include low levels of formal education, existence of ill health (often including above-average incidences of HIV/AIDS) and inadequate organizational structures. The opportunities available are limited, as smallscale fishing communities face a lack of alternative livelihoods, youth unemployment, unhealthy and unsafe working conditions, forced labour, and child labour. Pollution, environmental degradation, climate change impacts and natural and human-induced disasters add to the threats facing small-scale fishing communities. All these factors make it difficult for small-scale fishers and fish workers to make their voices heard, defend their human rights and tenure rights, and secure the sustainable use of the fishery resources on which they depend.

Perlindungan dan peningkatan kontribusi perikanan skala kecil banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Perkembangan sektor perikanan selama tiga sampai empat dekade terakhir dalam banyak kasus di seluruh dunia telah menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya dan mengancam habitat dan ekosistemnya. Praktek-praktek adat untuk alokasi dan pembagian kemanfaatan sumber daya perikanan skala kecil, yang mungkin telah ada dari sekian generasi, telah berubah sebagai hasil dari sistem manajemen perikanan non-partisipatif dan seringkali terpusat, perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan demografis. Masyarakat perikanan skala kecil juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak setara. Di banyak tempat, konflik dengan pengoperasian penangkapan ikan skala besar menjadi isu penting, dan ada saling ketergantungan yang semakin tinggi atau persaingan antara perikanan skala kecil dan sektor lainnya. Sektor-sektor lain tersebut sering memiliki pengaruh politik atau ekonomi yang lebih kuat, dan sektor-sektor tersebut termasuk: pariwisata, akuakultur, pertanian, energi, pertambangan, industri dan pembangunan infrastruktur.

Ketika kemiskinan ada di dalam masyarakat nelayan skala kecil, hal ini bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga karena faktor-faktor yang menghambat pemenuhan HAM termasuk hak-hak sipil, berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat perikanan skala kecil biasanya berada di daerah terpencil dan cenderung memiliki keterbatasan atau ketidakberuntungan terhadap akses pasar, dan mungkin miskin akses kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya. Karakteristik lainnya meliputi tingkat pendidikan formal yang rendah (sering termasuk prevalensi penderita HIV/AIDS di atas rata-rata) dan struktur organisasi yang tidak memadai. Peluang-peluang yang tersedia sangat terbatas, dimana masyarakat nelayan skala kecil menghadapi kekurangan mata pencaharian alternatif, kaum muda yang menganggur, kondisi kerja yang tidak sehat dan tidak aman, kerja paksa, serta buruh anak kecil. Polusi, degradasi lingkungan, dampak perubahan iklim serta bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia menjadi ancaman tambahan yang dihadapi masyarakat nelayan skala kecil. Semua faktor di atas semakin menyulitkan posisi nelayan dan buruh nelayan skala kecil untuk didengar suaranya, dibela hak asasi dan hak kepemilikannya, serta jaminan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan sebagai tempat mereka bergantung.

These Guidelines have been developed through a participatory and consultative process, involving representatives of small-scale fishing communities, civil society organizations (CSOs), governments, regional organizations and other stakeholders. A Technical Consultation of the Food and Agriculture Organization then reviewed the Guidelines. They take into account a wide range of important considerations and principles, including equality and non-discrimination, participation and inclusion, accountability and the rule of law, and the principle that all human rights are universal, indivisible, interrelated and interdependent. The Guidelines are consistent with and promote international human rights standards. These Guidelines are complementary to the Code and its related instruments. They also take into account the technical guidelines, such as the Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 10 “Increasing the Contribution of Small-Scale Fisheries to Poverty Alleviation and Food Security”, as well as other voluntary international instruments, such as the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (Tenure Guidelines) and the Voluntary Guidelines to support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security (Right to Food Guidelines), as applicable. States and other stakeholders are encouraged to also consult these other guidelines, as well as relevant international and regional instruments, to fully integrate applicable obligations, voluntary commitments and available guidance.

Petunjuk ini telah dikembangkan melalui proses partisipatif dan konsultatif, yang melibatkan perwakilan-perwakilan masyarakat nelayan skala kecil, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, organisasi regional dan pemangku kepentingan lainnya. Sebuah konsultan teknis FAO kemudian telah meninjau kembali Petunjuk ini. Mereka juga turut memperhatikan berbagai prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan yang penting, termasuk kesetaraan dan non-diskriminasi, partisipasi dan inklusi, akuntabilitas dan supremasi hukum, serta prinsip bahwa HAM bersifat universal, tak terpisahkan, saling terkait dan saling tergantung. Petunjuk ini selaras dan mendukung standar HAM internasional. Petunjuk ini menjadi pelengkap bagi ketentuan dalam Tata Laksana dan instrument yang terkait. Mereka juga mempertimbangkan Petunjuk teknis, seperti Petunjuk Teknis Perikanan yang Bertanggung Jawab Nomor 10 "Meningkatkan Kontribusi Perikanan Skala-Kecil untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan", serta instrumen sukarela internasional lainnya, seperti Petunjuk Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (Petunjuk Kepemilikan) dan Petunjuk Sukarela untuk mendukung Realisasi Progresif Hak untuk Pemenuhan Makanan dalam Konteks Ketahanan Pangan (Petunjuk Hak atas Pangan), yang berlaku. Negara dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk juga mengkonsultasikan petunjuk-petunjuk lainnya tersebut, serta instrumen-instrumen internasional dan regional yang relevan, untuk sepenuhnya mengintegrasikan kewajiban yang berlaku, komitmen sukarela dan bimbingan yang tersedia.

PART 1: INTRODUCTION

1. OBJECTIVES

1.1. The objectives of these Guidelines are:

- a) to enhance the contribution of small-scale fisheries to global food security and nutrition and to support the progressive realization of the right to adequate food,
- b) to contribute to the equitable development of small-scale fishing communities and poverty eradication and to improve the socio-economic situation of fishers and fish workers within the context of sustainable fisheries management,
- c) to achieve the sustainable utilization, prudent and responsible management and conservation of fisheries resources consistent with the CCRF and related instruments,
- d) to promote the contribution of small-scale fisheries to an economically, socially and environmentally sustainable future for the planet and its people,
- e) to provide guidance that could be considered by States and stakeholders for the development and implementation of ecosystem friendly and participatory policies, strategies and legal frameworks for the enhancement of responsible and sustainable small-scale fisheries,
- f) to enhance public awareness and promote the advancement of knowledge on the culture, role, contribution and potential of small-scale fisheries, considering ancestral and traditional knowledge, and their related constraints and opportunities.

BAGIAN 1: PENDAHULUAN

1. TUJUAN

1.1. Tujuan Petunjuk ini adalah untuk :

- a) meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil bagi ketahanan pangan dan gizi masyarakat global serta untuk mendukung realisasi progresif dari hak-hak atas pangan yang layak,
- b) berkontribusi pada pembangunan masyarakat nelayan skala kecil yang merata dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kondisi sosial-ekonomi nelayan dan buruh nelayan dalam tatanan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,
- c) mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab serta konservasi sumber daya perikanan yang sesuai dengan Tata Laksana Untuk Perikanan Yang Bertanggungjawab (CCRF) dan instrumen terkait lainnya,
- d) mendorong kontribusi perikanan skala kecil pada sebuah masa depan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi bumi dan orang-orangnya,
- e) memberikan petunjuk yang dapat dijadikan pertimbangan oleh negara dan para pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka hukum yang ramah lingkungan dan partisipatif untuk peningkatan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,
- f) untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan mendorong peningkatan pengetahuan mengenai budaya, peranan, kontribusi dan potensi perikanan skala kecil, dengan mempertimbangkan pengetahuan leluhur dan tradisional, dan berbagai kendala dan peluang yang dihadapinya.

- 1.2. These objectives should be achieved through the promotion of a human rights-based approach, by empowering small-scale fishing communities, including both men and women, to participate in decision-making processes, and to assume responsibilities for sustainable use of fishery resources, and placing emphasis on the needs of developing countries and for the benefit of vulnerable and marginalized groups.

2. NATURE AND SCOPE

- 2.1. These Guidelines are voluntary in nature. The Guidelines should apply to small-scale fisheries in all contexts, be global in scope but with a specific focus on the needs of developing countries.
- 2.2. These Guidelines are relevant to small-scale fisheries both in marine and inland waters, i.e. men and women working in the full range of activities along the value chain, and pre- and post harvest activities. The Important linkages between small-scale fisheries and aquaculture are recognized, but these Guidelines principally focus on capture fisheries.
- 2.3. The Guidelines are addressed to FAO Members and non-Members, at all levels of the State, as well as to subregional, regional, international and intergovernmental organizations (IGOs) and small-scale fisheries actors (fishers, fish workers, their communities, traditional and customary authorities, and related professional organizations and CSOs). They are also aimed at research and academic institutions, the private sector, non-governmental organizations (NGOs) and all others concerned with the fisheries sector, coastal and rural development and the use of the aquatic environment.
- 2.4. The Guidelines recognize the great diversity of small-scale fisheries and that there is no single, agreed definition of the subsector. Accordingly, the Guidelines do not prescribe a standard definition

- 1.2. Tujuan-tujuan tersebut harus dicapai melalui dukungan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan memberdayakan masyarakat nelayan skala kecil, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan untuk memikul tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan memberikan penekanan atas kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dan untuk kepentingan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

2. SIFAT DAN RUANG LINGKUP

- 2.1. Petunjuk ini bersifat sukarela. Petunjuk ini harus berlaku untuk perikanan skala kecil didalam semua konteks, memiliki ruang lingkup global, tapi dengan sebuah fokus khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.
- 2.2. Petunjuk ini adalah relevan untuk perikanan skala kecil baik perairan laut maupun perairan pedalaman, antara lain laki-laki dan perempuan yang bekerja di seluruh rangkaian kegiatan sepanjang rantai nilai produksi, dan kegiatan-kegiatan pra-dan pasca panen. Keterkaitan yang penting antara perikanan skala kecil dan budidaya diakui, tetapi Petunjuk ini difokuskan terutama pada perikanan tangkap.
- 2.3. Petunjuk ini ditujukan bagi negara anggota maupun bukan anggota FAO, di setiap tingkatan pemerintahan, serta organisasi-organisasi sub-regional, regional, internasional dan antar pemerintah serta pelaku perikanan skala kecil (nelayan, buruh nelayan, masyarakat, otoritas tradisional dan adat, dan organisasi-organisasi profesional dan layanan konsumen (Organisasi Masyarakat Sipil) terkait). Petunjuk ini juga ditujukan bagi lembaga-lembaga penelitian dan akademis, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM) dan semua hal yang berhubungan dengan sektor perikanan, pembangunan wilayah pesisir dan pedesaan dan penggunaan lingkungan air.
- 2.4. Petunjuk ini mengakui keberagaman perikanan skala kecil dan bahwa tidak ada satu pun definisi pokok yang disepakati dari sub sektor tersebut. Dengan demikian, Petunjuk ini tidak menentukan

of small-scale fisheries nor how the Guidelines should be applied in a national context. These Guidelines are especially relevant to subsistence small-scale fisheries and vulnerable fisheries people. To ensure transparency and accountability in the application of the Guidelines, it is important to ascertain which activities and operators are considered small-scale, and to identify vulnerable and marginalized groups needing greater attention. This should be undertaken at a regional, subregional or national level and according to the particular context in which they are to be applied. States should ensure that such identification and application are guided by meaningful and substantive participatory, consultative, multilevel and objective-oriented processes so that the voices of both men and women are heard. All parties should support and participate, as appropriate and relevant, in such processes.

- 2.5. These Guidelines should be interpreted and applied in accordance with national legal systems and their institutions.

3. GUIDING PRINCIPLES

- 3.1. These Guidelines are based on international human rights standards, responsible fisheries standards and practices and sustainable development according to the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) outcome document ‘The future we want’, the Code and other relevant instruments, paying particular attention to vulnerable and marginalized groups and the need to support the progressive realization of the right to adequate food.

1. **Human rights and dignity:** recognizing the inherent dignity and the equal and inalienable human rights of all individuals, all parties should recognize, respect, promote and protect the human rights principles and their applicability to communities dependent on small-scale fisheries, as stipulated by international human rights standards: universality and inalienability; indivisibility; interdependence and

standar definisi perikanan skala kecil atau bagaimana Petunjuk ini harus diterapkan dalam konteks nasional. Petunjuk ini sangat relevan bagi perikanan subsisten skala kecil dan kelompok yang rentan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya, adalah penting untuk memastikan kegiatan-kegiatan dan operator-operator mana yang dapat dianggap sebagai skala kecil, dan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan yang membutuhkan perhatian yang lebih besar. Hal ini harus dilakukan pada tingkat regional, sub-regional atau nasional sesuai dengan konteks tertentu di mana mereka harus diterapkan. Negara harus menjamin bahwa identifikasi dan aplikasi tersebut dipandu oleh proses-proses partisipasi yang substantif dan bermakna, konsultatif, bertingkat dan berorientasi pada tujuan sehingga aspirasi tersebut baik lelaki maupun perempuan dapat didengar. Semua pihak harus mendukung dan berpartisipasi, secara tepat dan relevan, dalam proses tersebut.

- 2.5. Petunjuk ini harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kelembagaannya yang berlaku.

3. PRINSIP-PRINSIP PETUNJUK

- 3.1. Petunjuk ini didasarkan pada standar-standar internasional hak asasi manusia (HAM), standar-standar dan praktek-praktek perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan dokumen hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) 'Masa depan yang kita inginkan', Tata Laksana (CCRF) dan instrumen relevan lainnya, yang secara khusus memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dan kebutuhan untuk mendukung realisasi progresif dari hak-hak atas pangan yang layak.

1. **Hak asasi manusia dan martabat:** mengakui martabat yang melekat dan hak asasi manusia yang sama dan mutlak dari setiap individu, semua pihak harus mengakui, menghormati, mendukung dan melindungi prinsip-prinsip HAM dan penerapannya bagi masyarakat yang bergantung pada perikanan skala kecil, sebagaimana diatur dengan standar-standar internasional hak asasi manusia: universal dan tidak

interrelatedness; non-discrimination and equality; participation and inclusion; accountability and the rule of law. States should respect and protect the rights of defenders of human rights in their work on small-scale fisheries. All non-state actors including business enterprises related to or affecting small-scale fisheries have a responsibility to respect human rights. States should regulate the scope of activities in relation to small-scale fisheries of non-state actors to ensure their compliance with international human rights standards.

2. **Respect of cultures:** recognizing and respecting existing forms of organization, traditional and local knowledge and practices of small-scale fishing communities, including indigenous peoples and ethnic minorities encouraging women leadership and taking into account Art. 5 of TC-SSF/2014/23 the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
3. **Non-discrimination:** promoting in the small-scale fisheries the elimination of all kinds of discrimination in policies and in practice.
4. **Gender equality and equity** is fundamental to any development. Recognizing the vital role of women in small-scale fisheries, equal rights and opportunities should be promoted.
5. **Equity and equality:** promoting justice and fair treatment – both legally and in practice –of all people and peoples, including equal rights to the enjoyment of all human rights. At the same time, differences between women and men should be acknowledged and specific measures taken to accelerate de facto equality, i.e. using preferential treatment where required to achieve Equitable outcomes, particularly for vulnerable and marginalized groups.

dapat dicabut; tidak terpisahkan; saling ketergantungan dan keterkaitan; non-diskriminasi dan kesetaraan; partisipasi dan keikutsertaan; akuntabilitas dan supremasi hukum. Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak pembela HAM dalam pekerjaannya di perikanan skala kecil. Semua pelaku non-negara, termasuk usaha bisnis yang terkait dengan atau mempengaruhi perikanan skala kecil memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Negara harus mengatur ruang lingkup kegiatan dalam kaitannya dengan perikanan skala kecil untuk memastikan kepatuhan dengan standar HAM internasional.

2. **Menghormati budaya:** mengakui dan menghormati bentuk-bentuk organisasi yang ada, pengetahuan tradisional dan lokal dan praktek-praktek masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas yang mendukung kepemimpinan perempuan dan mempertimbangkan Pasal 5 dari TC-SSF/2014/23 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
3. **Non-diskriminasi:** mendorong perikanan skala kecil dalam penghapusan segala macam diskriminasi dalam kebijakan dan praktek.
4. **Kesetaraan dan keadilan gender** merupakan dasar terhadap setiap pengembangan. Menyadari peran penting perempuan dalam perikanan skala kecil, hak dan kesempatan yang sama harus dijunjung.
5. **Keadilan dan kesetaraan:** mendukung keadilan dan perlakuan yang adil - baik secara hukum maupun dalam prakteknya - bagi semua orang-orang dan bangsa-bangsa, termasuk hak yang sama untuk menikmati semua hak asasi manusia. Pada saat yang sama, perbedaan antara perempuan dan laki-laki harus diakui dan langkah-langkah khusus yang diambil untuk mempercepat fakta kesetaraan, yaitu dengan menggunakan perlakuan yang istimewa jika diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang adil, terutama bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

6. **Consultation and participation:** ensuring active, free, effective, meaningful and informed participation of small-scale fishing communities, including indigenous peoples, taking into account the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UN DRIP) in the whole decision-making process related to fishery resources and areas where small-scale fisheries operate as well as adjacent land areas, and taking existing power imbalances between different parties into consideration. This should include feedback and support from those who could be affected by decisions prior to these being taken, and responding to their contributions.

7. **Rule of law:** adopting a rules-based approach for small-scale fisheries through laws that are widely publicized in applicable languages, applicable to all, equally enforced and independently adjudicated, and that are consistent with existing obligations under national and international law, and with due regard to voluntary commitments under applicable regional and international instruments.

8. **Transparency:** clearly defining and widely publicizing policies, laws and procedures in applicable languages, and widely publicizing decisions in applicable languages and in formats accessible to all.

9. **Accountability:** holding individuals, public agencies and non-state actors responsible for their actions and decisions according to the principles of the rule of law.

10. **Economic, social and environmental sustainability:** applying the precautionary approach and risk management to guard against undesirable outcomes, including overexploitation of fishery resources and negative environmental, social and economic impacts.

6. **Konsultasi dan partisipasi:** memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna dan informatif dari masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat, dengan mempertimbangkan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UN DRIP) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dan daerah di mana perikanan skala kecil beroperasi serta daerah yang berbatasan, dan mengambil pertimbangan terhadap ketidakseimbangan kekuatan yang ada antara pihak-pihak yang berbeda. Ini harus mencakup umpan balik dan dukungan dari orang-orang yang dapat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat, dan menanggapi kontribusi mereka.
7. **Aturan Hukum:** mengadopsi pendekatan berbasis aturan untuk perikanan skala kecil melalui undang-undang yang dipublikasikan secara luas dalam bahasa yang baku, berlaku untuk semua, sama-sama ditegakkan dan bebas diputuskan, dan yang konsisten dengan kewajiban yang ada dalam hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.
8. **Transparansi:** secara jelas mendefinisikan dan mempublikasikan secara luas kebijakan-kebijakan, hukum dan prosedur dalam bahasa yang baku, dan secara luas mempublikasikan keputusan-keputusan dalam bahasa yang baku dan dalam format yang dapat diakses oleh semua.
9. **Akuntabilitas:** individu-individu, lembaga-lembaga publik dan pelaku-pelaku non-pemerintah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan hukum.
10. **Keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan:** menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan, termasuk eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan dan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi.

11. **Holistic and integrated approaches:** recognizing the ecosystem approach to fisheries (EAF) as an important guiding principle, embracing the notions of comprehensiveness and sustainability of all parts of ecosystems as well as the livelihoods of small-scale fishing communities, and ensuring cross-sectoral coordination as small-scale fisheries are closely linked to and dependent on many other sectors.
12. **Social responsibility:** promoting community solidarity and collective and corporate responsibility. The fostering of an environment that promotes collaboration among stakeholders should be encouraged.
13. **Feasibility and social and economic viability:** ensuring that policies, strategies, plans and actions for improving small-scale fisheries governance and development are socially and economically sound and rational. They should be informed by existing conditions, implementable and adaptable to changing circumstances, and should support community resilience.

4. **RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL INSTRUMENTS**

- 4.1. These Guidelines should be interpreted and applied consistent with existing rights and obligations under national and international law and with due regard to voluntary commitments under applicable regional and international instruments. They are complementary to and support national, regional and international initiatives that address human rights, responsible fisheries and sustainable development. The Guidelines were developed complementary to the Code and support responsible fisheries and sustainable resource utilization in accordance with this instrument.
- 4.2. Nothing in the Guidelines should be read as limiting or undermining any rights or obligations to which a State may be subject under

11. **Pendekatan terpadu dan menyeluruh:** mengakui pendekatan ekosistem perikanan (EAF) sebagai prinsip petunjuk yang penting, meliputi gagasan yang menyeluruh dan berkelanjutan dari seluruh bagian ekosistem serta mata pencaharian masyarakat nelayan skala kecil, dan memastikan koordinasi lintas-sektoral sebagaimana perikanan skala kecil terkait erat dan tergantung pada sektor lainnya.
12. **Tanggung jawab sosial:** mendukung solidaritas dan tanggung jawab bersama masyarakat dan perusahaan. Pembinaan lingkungan yang mendukung kolaborasi antara para pemangku kepentingan.
13. **Kelayakan dan kelangsungan hidup sosial dan ekonomi:** memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, strategi, rencana dan tindakan-tindakan untuk memperbaiki tata kelola perikanan skala kecil dan pembangunan perikanan secara sosial dan ekonomis dan rasional. Masyarakat perikanan skala kecil harus diinformasikan dengan kondisi yang ada, yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan perubahan keadaan, dan harus mendukung ketahanan masyarakat.

4. HUBUNGAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL LAINNYA

- 4.1. Petunjuk ini harus ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan dengan memperhatikan komitmen-komitmen yang bersifat sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Mereka saling melengkapi dan mendukung inisiatif nasional, regional dan internasional yang terkait dengan hak asasi manusia, perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan. Petunjuk tersebut dikembangkan dengan melengkapi Tata Laksana (CCRF) dan mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sesuai dengan instrumen ini.
- 4.2. Tidak ada didalam Petunjuk ini yang dianggap sebagai pembatas atau mengurangi hak atau kewajiban suatu Negara yang dapat

international law. These Guidelines may be used to guide amendments and inspire new or supplementary legislative and regulatory provisions.

PART 2: RESPONSIBLE FISHERIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

5. GOVERNANCE OF TENURE AND RESOURCE MANAGEMENT

5.1. These Guidelines recognize the need for responsible and sustainable use of aquatic biodiversity and natural resources to meet the developmental and environmental requirements of present and future generations. Small-scale fishing communities need to have secure tenure rights to the resources that form the basis for their social and cultural well-being, their livelihoods and their sustainable development. The Guidelines support equitable distribution of the benefits yield from responsible management of fisheries and ecosystems, rewarding small-scale fishers and fish workers, both men and women.

5A. Responsible governance of tenure

5.2. All parties should recognize that responsible governance of tenure of land, fisheries and forests applicable in small-scale fisheries is central for the realization of human rights, food security, poverty eradication, sustainable livelihoods, social stability, housing security, economic growth and rural and social development.

5.3. States, in accordance with their legislation, should ensure that small-scale fishers, fish workers and their communities have secure, equitable, and socially and culturally appropriate tenure rights to fishery resources (marine and inland) and small-scale fishing areas

dikenakan di bawah hukum internasional. Petunjuk ini dapat digunakan untuk memandu perubahan dan menginspirasi ketentuan legislatif dan peraturan baru atau tambahan.

BAGIAN 2: PERIKANAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

5. TATA KELOLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

5.1. Petunjuk ini mengakui kebutuhan pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam perairan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan yang akan datang. Masyarakat nelayan skala kecil harus memiliki jaminan atas hak kepemilikan sumberdaya sebagai dasar bagi kesejahteraan sosial dan budaya mereka, mata pencaharian mereka serta pembangunan yang berkelanjutan. Petunjuk ini mendukung pemerataan yang sama atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan dan ekosistem yang bertanggung jawab, bermanfaat bagi nelayan skala kecil dan buruh nelayan, baik lelaki maupun perempuan.

5A. Tata kelola kepemilikan yang bertanggung jawab

5.2. Semua pihak harus mengakui bahwa tata kelola yang bertanggungjawab atas kepemilikan lahan, perikanan dan hutan yang berlaku pada perikanan skala kecil merupakan hal yang penting untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mata pencaharian yang berkelanjutan, stabilitas sosial, jaminan perumahan, pertumbuhan ekonomi dan pedesaan serta pembangunan sosial.

5.3. Negara, sesuai dengan aturan perundang-undangnya, harus memastikan bahwa nelayan skala kecil, buruh nelayan dan komunitas masyarakat nelayan memiliki jaminan, yang adil, dan hak kepemilikan terhadap sumberdaya perikanan (lautan dan pedalaman) secara sosial dan budaya dan daerah penangkapan ikan

and adjacent land, with a special attention paid to women with respect to tenure rights.

- 5.4. All parties, in accordance with their legislation, should recognize, respect and protect all forms of legitimate tenure rights, taking into account, where appropriate, customary rights, to aquatic resources and land and small-scale fishing areas enjoyed by small-scale fishing communities. When necessary, in order to protect various forms of legitimate tenure rights, legislation to this effect should be provided. States should take appropriate measures to identify record and respect legitimate tenure right holders and their rights. Local norms and practices, as well as customary or otherwise preferential access to fishery resources and land by small-scale fishing communities including indigenous peoples and ethnic minorities, should be recognized, respected and protected in ways that are consistent with international human rights law. The UN DRIP and the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities should be taken into account, as appropriate. Where constitutional or legal reforms strengthen the rights of women and place them in conflict with custom, all parties should cooperate to accommodate such changes in the customary tenure systems.

- 5.5. States should recognize the role of small-scale fishing communities and indigenous peoples to restore, conserve, protect and co-manage local aquatic and coastal ecosystems.

- 5.6. Where States own or control water (including fishery resources) and land resources, they should determine the use and tenure rights of these resources taking into consideration, *inter alia*, social, economic and environmental objectives. States should, as applicable, recognize and safeguard publically owned resources that are collectively used and managed, in particular by small-scale fishing communities.

skala kecil dan lahan yang berbatasan, dengan perhatian khusus diberikan kepada perempuan terkait dengan hak-hak kepemilikan.

- 5.4. Semua pihak, sesuai dengan aturan perundang-undangannya, harus mengakui, menghormati dan melindungi segala bentuk hak kepemilikan yang sah, dengan mempertimbangkan, jika memungkinkan, hak-hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan skala kecil. Bila diperlukan, untuk melindungi berbagai bentuk hak kepemilikan yang sah, aturan perundangan yang mengikat harus dibuat. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghormati para pemegang hak kepemilikan yang sah dan hak-hak mereka. Norma-norma dan kebiasaan lokal, serta adat atau akses istimewa ke sumber daya perikanan dan lahan oleh masyarakat nelayan skala kecil termasuk masyarakat adat dan etnis minoritas, harus diakui, dihormati dan dilindungi dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia. DRIP PBB dan Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang Yang Dimiliki Negara atau Etnis, Agama dan Minoritas Linguistik harus diperhatikan secara benar. Pada saat reformasi konstitusional atau legal memperkuat hak-hak perempuan dan menempatkan mereka dalam konflik dengan adat, semua pihak harus bekerja sama untuk mengakomodasi perubahan tersebut dalam sistem kepemilikan adat.
- 5.5. Negara harus mengakui peran masyarakat nelayan skala kecil dan masyarakat adat untuk memulihkan, melestarikan, melindungi dan bersama-sama mengelola lingkungan perairan lokal dan ekosistem pesisir.
- 5.6. Manakala negara memiliki atau mengontrol perairan (termasuk sumber daya perikanan) dan sumber daya tanah, mereka harus menentukan penggunaan dan hak kepemilikan sumber daya tersebut dengan mempertimbangkan antara lain, tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara harus, sebagaimana berlaku, mengakui dan menjaga sumber daya publik yang dimiliki yang secara bersama-sama digunakan dan dikelola, terutama oleh masyarakat nelayan skala kecil.

- 5.7. Taking due account of Art. 6.18 of the Code, States should where appropriate grant preferential access of small-scale fisheries to fish in waters under national jurisdiction, with a view to achieving equitable outcomes for different groups of people, in particular vulnerable groups. Where appropriate, specific measures, *inter alia*, the creation and enforcement of exclusive zones for small-scale fisheries, should be considered. Small-scale fisheries should be given due consideration before agreements on resource access are entered into with third countries and third parties.
- 5.8. States should adopt measures to facilitate equitable access to fishery resources for small-scale fishing communities, including, as appropriate, redistributive reform, taking into account the provisions of the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.
- 5.9. States should ensure that small-scale fishing communities are not arbitrarily evicted and that their legitimate tenure rights are not otherwise extinguished or infringed. States should recognize that competition from other users is increasing within small-scale fisheries areas and that small-scale fishing communities, in particular vulnerable and marginalized groups, are often the weaker party in conflicts with other sectors and may require special support if their livelihoods are threatened by the development and activities of other sectors.
- 5.10. States and other parties should, prior to the implementation of large-scale development projects that might impact small-scale fishing communities, consider the social, economic and environmental impacts through impact studies, and hold effective and meaningful consultations with these communities, in accordance with national legislation.

- 5.7. Memperhatikan Pasal 6.18 dari Tata Laksana (CCRF), negara bila memungkinkan harus memberikan akses khusus kepada perikanan skala kecil untuk menangkap ikan di perairan di bawah yurisdiksi nasional, dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil yang adil bagi kelompok-kelompok orang yang berbeda, khususnya kelompok-kelompok yang rentan. Apabila memungkinkan, tindakan-tindakan khusus, antara lain pembentukan dan penegakan zona eksklusif perikanan skala kecil, harus dipertimbangkan. Perikanan skala kecil harus benar-benar dipertimbangkan sebelum kesepakatan-kesepakatan terkait akses terhadap sumber daya diberikan kepada negara-negara ketiga dan pihak-pihak ketiga.
- 5.8. Negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk memfasilitasi akses yang adil terhadap sumber daya perikanan bagi masyarakat nelayan skala kecil, termasuk, secara tepat, melakukan reformasi redistributif, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.
- 5.9. Negara harus menjamin bahwa masyarakat nelayan skala kecil tidak boleh secara sewenang-wenang diusir dan bahwa hak kepemilikan yang sah yang dimiliki mereka tidak boleh dilanggar. Negara harus mengakui bahwa persaingan dengan pengguna lainnya akan meningkat didalam wilayah perikanan skala kecil dan bahwa masyarakat nelayan skala kecil tersebut, khususnya kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, adalah seringkali merupakan pihak yang lebih lemah dalam konflik dengan sektor-sektor lain dan mungkin memerlukan dukungan khusus jika mata pencaharian mereka terancam oleh pembangunan dan kegiatan sektor-sektor lain.
- 5.10. Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional.

- 5.11. States should provide small-scale fishing communities and individuals, including vulnerable and marginalized people, access through impartial and competent judicial and administrative bodies to timely, affordable and effective means of resolving disputes over tenure rights in accordance with national legislation, including alternative means of resolving such disputes, and should provide effective remedies, which may include an entitlement to appeal, as appropriate. Such remedies should be promptly enforced in accordance with national legislation and may include restitution, indemnity, just compensation and reparation.
- 5.12. States should strive to restore access to traditional fishing grounds and coastal lands to small scale fishing communities that have been displaced by natural disasters and/or armed conflict taking into consideration the sustainability of fisheries resources. States should establish mechanisms to support fishing communities affected by grave human rights violations to rebuild their lives and livelihoods. Such steps should include the elimination of any form of discrimination against women in tenure practices in case of natural disasters and/or armed conflict.

5B. Sustainable resource management

- 5.13. States and all those engaged in fisheries management should adopt measures for the long-term conservation and sustainable use of fisheries resources and to secure the ecological foundation for food production. They should promote and implement appropriate management systems, consistent with their existing obligations under national and international law and voluntary commitments, including the Code, that give due recognition to the requirements and opportunities of small-scale fisheries.
- 5.14. All parties should recognize that rights and responsibilities come together; tenure rights are balanced by duties, and support the long-

- 5.11. Negara harus menyediakan akses kepada masyarakat dan individu-individu nelayan skala kecil, termasuk masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, melalui badan peradilan dan administratif yang berimbang dan berkompeten sebagai sarana yang tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan atas hak-hak kepemilikan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional, termasuk menyediakan sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan harus memberikan pemulihan yang efektif, yang mungkin mencakup hak untuk mengajukan banding. Hal tersebut harus segera diberlakukan sesuai dengan aturan perundangan nasional dan mungkin termasuk restitusi, ganti rugi, kompensasi yang adil dan reparasi.
- 5.12. Negara harus berusaha untuk memulihkan akses daerah penangkapan ikan tradisional dan lahan pesisir bagi masyarakat nelayan skala kecil yang telah mengungsi akibat bencana alam dan / atau konflik bersenjata dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya perikanan. Negara harus menetapkan mekanisme untuk mendukung masyarakat nelayan yang terkena dampak pelanggaran HAM berat untuk membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka. Langkah-langkah tersebut harus mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam praktek kepemilikan dalam kasus bencana alam dan/atau konflik bersenjata.

5B. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan

- 5.13. Negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan harus mengadopsi tindakan-tindakan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya perikanan dan untuk menjamin landasan ekologis untuk produksi pangan. Mereka harus mendorong dan menerapkan sistem manajemen yang tepat, sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan komitmen-komitmen yang bersifat sukarela, termasuk Tata Laksana (CCRF), yang memberikan pengakuan sebenar-benarnya kepada persyaratan-persyaratan dan kesempatan-kesempatan dari perikanan skala kecil.
- 5.14. Semua pihak harus mengakui bahwa hak-hak dan tanggung jawab hadir secara bersamaan; hak-hak kepemilikan diimbangi oleh

term conservation and sustainable use of resources and the maintenance of the ecological foundation for food production. Small-scale fisheries should utilize fishing practices that minimize harm to the aquatic environment and associated species and support the sustainability of the resource.

- 5.15. States should facilitate, train and support small-scale fishing communities to participate in and take responsibility for, taking into consideration their legitimate tenure rights and systems, the management of the resources on which they depend for their well-being and that are traditionally used for their livelihoods. Accordingly, States should involve small-scale fishing communities – with special attention to equitable participation of women, vulnerable and marginalized groups – in the design, planning and, as appropriate, implementation of management measures, including protected areas, affecting their livelihood options. Participatory management systems, such as co-management, should be promoted in accordance with national law.

- 5.16. States should ensure the establishment of new or promote the application of existing monitoring, control and surveillance (MCS) systems applicable to and suitable for small-scale fisheries. They should provide support to such systems, involving small-scale fisheries actors as appropriate and promoting participatory arrangements within the context of co-management. States should ensure effective monitoring and enforcement mechanisms to deter, prevent and eliminate all forms of illegal and/or destructive fishing practices having a negative effect on marine and inland ecosystems. States should endeavour to improve registration of the activity. Small-scale fishers should support the MCS systems and provide to the state fisheries authorities the information required for the management of the activity.

kewajiban-kewajibannya, dan mendukung konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya dan pemeliharaan landasan ekologis untuk produksi pangan. Perikanan skala kecil harus memanfaatkan praktek-praktek penangkapan ikan yang meminimalkan kerusakan lingkungan perairan dan spesies yang berasosiasi dan mendukung keberlanjutan sumber daya tersebut.

- 5.15. Negara harus memfasilitasi, melatih dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya tempat mereka menggantungkan kesejahteraan dan yang secara tradisional digunakan sebagai mata pencahariannya, dengan mempertimbangkan hak-hak dan sistem-sistem kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, negara harus melibatkan masyarakat nelayan skala kecil - dengan perhatian khusus pada partisipasi yang adil dari kaum perempuan, kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan - dalam perancangan, perencanaan, dan jika perlu, pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan, termasuk kawasan-kawasan yang dilindungi, yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan mata pencaharian mereka. Sistem manajemen partisipatif, seperti ko-manajemen, harus dipromosikan sesuai dengan hukum nasional.
- 5.16. Negara harus memastikan berdirinya sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS) yang baru atau mendorong penerapan MCS yang sudah ada dan sesuai untuk perikanan skala kecil. Negara harus memberikan dukungan pada penerapan sistem tersebut, dengan melibatkan para pelaku perikanan skala kecil secara tepat dan mendorong pengaturan-pengaturan yang bersifat partisipatif dalam konteks ko-manajemen. Negara harus menjamin mekanisme-mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif untuk menghalangi, mencegah dan menghilangkan segala bentuk – praktek-praktek penangkapan ikan ilegal dan/atau bersifat merusak yang memiliki efek negatif terhadap ekosistem lautan dan pedalaman. Negara harus berusaha untuk memperbaiki registrasi kegiatan tersebut. Nelayan skala kecil harus mendukung sistem MCS dan memberikan informasi terkait yang diperlukan kepada otoritas perikanan negara untuk pelaksanaan kegiatan.

- 5.17. States should ensure that the roles and responsibilities within the context of co-management arrangements of concerned parties and stakeholders are clarified and agreed through a participatory and legally supported process. All parties are responsible for assuming the management roles agreed to. All endeavours should be made so that small-scale fisheries are represented in relevant local and national professional associations and fisheries bodies and actively take part in relevant decision-making and fisheries policy-making processes.
- 5.18. States and small-scale fisheries actors should encourage and support the role and involvement of both men and women, whether engaged in pre-harvest, harvest or post-harvest operations, in the context of co-management and in the promotion of responsible fisheries, contributing their particular knowledge, perspectives and needs. All parties should pay specific attention to the need to ensure equitable participation of women, designing special measures to achieve this objective.
- 5.19. Where transboundary and other similar issues exist, e.g. shared waters and fishery resources, States should work together to ensure that the tenure rights of small-scale fishing communities that are granted are protected.
- 5.20. States should avoid policies and financial measures that may contribute to fishing overcapacity and, hence, overexploitation of resources that have an adverse impact on small-scale fisheries.

6. SOCIAL DEVELOPMENT, EMPLOYMENT AND DECENT WORK

- 6.1. All parties should consider integrated, ecosystem and holistic approaches to small-scale fisheries management and development that take the complexity of livelihoods into account. Due attention

- 5.17. Negara harus menjamin bahwa peran-peran dan tanggung jawab-tanggung jawab didalam konteks pengaturan pengelolaan bersama dari para pihak dan pemangku kepentingan terkait telah diklarifikasi dan disepakati melalui sebuah proses yang partisipatif dan dilindungi secara hukum. Semua pihak bertanggung jawab untuk mengambil peran-peran manajemen yang telah disepakati. Semua upaya harus dilakukan agar perikanan skala kecil terwakili dalam asosiasi-asosiasi profesional dan badan/organisasi perikanan yang relevan di tingkat lokal dan nasional dan secara aktif mengambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan perikanan yang relevan.
- 5.18. Negara dan para pelaku perikanan skala kecil harus mendorong dan mendukung peranan dan keterlibatan lelaki dan perempuan, baik yang terlibat dalam kegiatan pra-panen, panen atau pasca panen, dalam konteks ko-manajemen dan penyelenggaraan perikanan yang bertanggung jawab, berkontribusi pengetahuan, perspektif dan kebutuhan khusus mereka. Semua pihak harus memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan tersebut untuk menjamin partisipasi yang setara dari perempuan, merancang langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan ini.
- 5.19. Manakala terdapat isu terkait lintas batas dan isu-isu lain yang sejenis, misalnya sumber daya perairan dan perikanan yang berbagi, negara harus bekerja sama untuk menjamin bahwa hak kepemilikan masyarakat nelayan skala kecil yang diberikan dapat terlindungi.
- 5.20. Negara harus menghindari kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan finansial yang dapat menyebabkan kelebihan kapasitas tangkap dan, dengan demikian, eksploitasi berlebihan dari sumber daya yang berdampak buruk pada perikanan skala kecil.

6. PEMBANGUNAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEKERJAAN YANG LAYAK

- 6.1. Semua pihak harus mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terintegrasi, ekosistem dan holistik untuk pengelolaan perikanan skala kecil dan pengembangan yang memperhatikan kompleksitas

to social and economic development may be needed to ensure that small-scale fishing communities are empowered and can enjoy their human rights.

- 6.2. States should promote investment in human resource development such as health, education, literacy, digital inclusion and other skills of a technical nature that generate value-added of the fisheries resources as well as awareness raising. States should take steps with a view to progressively ensuring that members of small-scale fishing communities and crafts peoples have affordable access to these and other essential services through national and subnational actions, including adequate housing, basic sanitation that is safe and hygienic, safe drinking water for personal and domestic uses, and sources of energy. Preferential treatment of women, indigenous peoples, and vulnerable and marginalized groups – in providing services and giving effect to non-discrimination and other human rights – should be accepted and promoted where it is required to ensure equitable benefits.

- 6.3. States should promote social security protection for workers in small-scale fisheries. They should take into account the characteristics of small-scale fisheries and apply security schemes to the entire value chain.

- 6.4. States should support the development of and access to other services that are appropriate for small-scale fishing communities with regard to, for example, savings, credit and insurance schemes, with special emphasis on ensuring the access of women to such services.

- 6.5. States should recognize as economic and professional operations the full range of activities along the small-scale fisheries value chain – both pre- and post-harvest; whether in an aquatic environment or on land; undertaken by men or by women. All activities should be considered: part-time, occasional and/or for subsistence.

sumber-sumber kehidupan. Perhatian yang serius terhadap pembangunan sosial dan ekonomi mungkin diperlukan untuk menjamin bahwa masyarakat nelayan skala kecil diberdayakan dan dapat menikmati hak-hak asasi mereka.

- 6.2. Negara harus mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia seperti investasi kesehatan, pendidikan, pemberantas buta huruf, inklusi digital dan keterampilan lainnya yang bersifat teknis yang menghasilkan nilai tambah serta peningkatan kepedulian pada sumber daya perikanan. Negara harus mengambil tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk semakin menjamin anggota-anggota masyarakat nelayan skala kecil dan masyarakat pengrajin memiliki akses terjangkau atas layanan-layanan tersebut dan layanan penting lainnya melalui aksi-aksi nasional dan sub-nasional, termasuk pemenuhan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis, air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga, dan sumber-sumber energi. Perlakuan istimewa kepada perempuan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan - didalam memberikan pelayanan-pelayanan dan memberikan efek pada non-diskriminasi dan hak-hak asasi manusia lainnya - harus diterima dan didorong di mana diperlukan untuk memastikan manfaat-manfaat yang adil.
- 6.3. Negara harus mendorong perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja perikanan skala kecil. Negara harus mempertimbangkan karakteristik perikanan skala kecil dan menerapkan skema jaminan sosial untuk seluruh rantai nilai perikanan skala kecil tersebut.
- 6.4. Negara harus mendukung pengembangan dan akses ke layanan-layanan lain yang sesuai untuk masyarakat nelayan skala kecil berkaitan dengan, misalnya, tabungan, kredit dan skema asuransi, dengan penekanan khusus pada memastikan akses perempuan terhadap layanan tersebut.
- 6.5. Negara harus mengakui seluruh kegiatan dari rantai nilai perikanan skala kecil sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan profesional - baik pra-dan pasca panen; apakah di lingkungan perairan atau di darat; dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Semua kegiatan-kegiatan tersebut harus dipertimbangkan: paruh waktu, sesekali

Professional and organizational development opportunities should be promoted, in particular for more vulnerable groups of post-harvest fish workers and women in small-scale fisheries.

- 6.6. States should promote decent work for all small-scale fisheries workers, including both the formal and informal sectors. States should create the appropriate conditions to ensure that fisheries activities in both the formal and informal sectors are taken into account in order to ensure the sustainability of small-scale fisheries in accordance with national law.
- 6.7. States should take steps with a view to the progressive realization of the right of small-scale fishers and fish workers to an adequate standard of living and to work in accordance with national and international human rights standards. States should create an enabling environment for sustainable development in small-scale fishing communities. States should pursue inclusive, non-discriminatory and sound economic policies for the use of marine, freshwater and land areas in order to permit small-scale fishing communities and other food producers, particularly women, to earn a fair return from their labour, capital and management, and encourage conservation and sustainable management of natural resources.
- 6.8. States and other stakeholders should support already existing, or the development of, complementary and alternative income-generating opportunities – in addition to earnings from fisheries-related activities – for small-scale fishing communities, as required and in support of sustainable resource utilization and livelihood diversification. The role of small-scale fisheries in local economies and the links of the subsector to the wider economy need to be recognized and benefited from. Small-scale fishing communities should equitably benefit from developments such as community-based tourism and small-scale responsible aquaculture.

dan/atau untuk subsisten. Kesempatan-kesempatan pengembangan keorganisasian dan keprofesionalan harus didorong, khususnya untuk kelompok-kelompok yang lebih rentan dari buruh nelayan pasca panen dan perempuan dalam perikanan skala kecil.

- 6.6. Negara harus mendorong pekerjaan yang layak bagi semua pekerja perikanan skala kecil, termasuk sektor formal dan informal. Negara harus menciptakan kondisi yang tepat untuk menjamin bahwa kegiatan perikanan, baik di sektor formal maupun informal yang diperhitungkan dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil sesuai dengan hukum nasional.
- 6.7. Negara harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk realisasi progresif hak nelayan skala kecil dan buruh nelayan untuk mendapatkan standar hidup yang memadai dan untuk bekerja sesuai dengan standar HAM nasional dan internasional. Negara harus menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di masyarakat nelayan skala kecil. Negara harus menciptakan kebijakan-kebijakan yang inklusif, non-diskriminatif dan ekonomis untuk pemanfaatan wilayah-wilayah laut, perairan tawar dan daratan agar masyarakat nelayan skala kecil dan produsen-produsen pangan lainnya, terutama perempuan, mendapatkan pengembalian yang adil dari kerja mereka, modal dan manajemen, dan mendorong konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
- 6.8. Negara dan pemangku kepentingan lainnya harus mendukung kesempatan-kesempatan yang sudah ada atau mengembangkan peluang untuk memperoleh pendapatan alternatif atau pelengkap – sebagai tambahan penghasilan dari kegiatan perikanan terkait – untuk masyarakat nelayan skala kecil, seperti yang dibutuhkan dan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan diversifikasi mata pencaharian. Peran perikanan skala kecil dalam perekonomian lokal dan hubungannya dengan sub sektor pada perekonomian yang lebih luas harus diakui dan dimanfaatkan. Masyarakat nelayan skala kecil harus mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan-pembangunan seperti pariwisata berbasis masyarakat dan budidaya perikanan skala kecil secara bertanggung jawab

- 6.9. States and all parties should create conditions for men and women of small-scale fishing communities to fish and to carry out fisheries-related activities in an environment free from crime, violence, mafia activities, piracy, theft, sexual abuse, corruption and abuse of authority. All parties should take steps to institute measures that aim to eliminate violence and to protect women exposed to such violence in small-scale fishing communities. States should ensure access to justice for victims of violence, abuse, etc., including within the household or community.

- 6.10. States and small-scale fisheries actors, including traditional and customary authorities, should understand, recognize and respect the role of migrant fishers and fish workers in small-scale fisheries, given that migration is a common livelihood strategy in small-scale fisheries. States and small-scale fisheries actors should cooperate to create the appropriate frameworks to allow for fair and adequate integration of migrants who engage in sustainable use of fisheries resources and who do not undermine local community-based fisheries governance and development in small-scale fisheries in accordance with national law. States should recognize the importance of coordinating among their respective national governments in regard to migration of fishers and fish workers in small-scale fisheries across national borders. Policies and management measures should be worked out in consultation with small-scale fisheries organizations and institutions.

- 6.11. States should recognize and address the underlying causes and consequences of transboundary movement of fishers and contribute to the understanding of transboundary issues affecting the sustainability of small-scale fisheries.

- 6.12. States should address occupational health issues and unfair working conditions of all small scale fishers and fish workers by ensuring that the necessary legislation is in place and is implemented in accordance with national legislation and international human rights

- 6.9. Negara dan semua pihak harus menciptakan kondisi-kondisi untuk laki-laki dan perempuan masyarakat nelayan skala kecil untuk menangkap ikan dan melaksanakan kegiatan perikanan terkait dalam lingkungan yang bebas dari kejahatan, kekerasan, kegiatan mafia, pembajakan, pencurian, pelecehan seksual, korupsi dan penyalahgunaan otoritas. Semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk melembagakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan kekerasan dan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan tersebut yang terjadi dalam masyarakat nelayan skala kecil. Negara harus menjamin akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan, pelecehan, dan lain-lain, termasuk dalam rumah tangga atau masyarakat.
- 6.10. Negara dan para pelaku perikanan skala kecil, termasuk otoritas tradisional dan adat, harus memahami, mengakui dan menghormati peran nelayan andon dan buruh nelayan dalam perikanan skala kecil, mengingat bahwa migrasi merupakan strategi mata pencaharian yang umum bagi perikanan skala kecil. Negara dan para pelaku perikanan skala kecil harus bekerjasama untuk menciptakan kerangka kerja yang tepat yang memungkinkan integrasi yang adil dan memadai bagi para nelayan andon yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan yang tidak merusak tata kelola perikanan berbasis masyarakat lokal dan pembangunan di perikanan skala kecil sesuai dengan hukum nasional. Negara harus mengakui pentingnya koordinasi diantara pemerintah nasional terkait dalam hal migrasi nelayan dan buruh perikanan skala kecil melewati perbatasan nasional. Kebijakan dan tindakan-tindakan pengelolaan harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga perikanan skala kecil.
- 6.11. Negara harus mengakui dan mengatasi penyebab dan konsekuensi dari perpindahan lintas batas nelayan yang mendasari dan berkontribusi pada pemahaman tentang isu-isu lintas batas yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan skala kecil.
- 6.12. Negara harus mengatasi masalah kesehatan kerja dan kondisi kerja yang tidak adil dari semua nelayan skala kecil dan buruh nelayan dengan memastikan bahwa undang-undang yang diperlukan adalah ada pada tempatnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan

standards and international instruments to which a State is party, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and relevant conventions of the International Labour Organization (ILO). All parties should strive to ensure the inclusion of the aspect of occupational health and safety as an integral part of fisheries management as well as of development initiatives.

- 6.13. States should eradicate forced labour, prevent debt-bondage of women, men and children, and adopt effective measures to protect fishers and fish workers, including migrants, with a view to the complete elimination of forced labour in fisheries, including small-scale fisheries.
- 6.14. States should provide and enable access to schools and education facilities that meet the needs of small-scale fishing communities and that facilitate gainful and decent employment of youth, respecting their career choices and providing equal opportunities for all boys and girls and young men and women.
- 6.15. Small-scale fisheries actors should recognize the importance of children's well-being and education for the future of the children themselves and of society at large. Children should go to school, be protected from all abuse and have all their rights respected in accordance with the Convention on the Rights of the Child.
- 6.16. All parties should recognize the complexity that surrounds safety-at-sea issues (in inland and marine fisheries) and the multiple causes behind deficient safety. This applies to all fishing activities. States should ensure the development, enactment and implementation of appropriate national laws and regulations that are consistent with international guidelines of FAO, the ILO and the International Maritime Organization (IMO) for work in fishing and sea safety in small scale fisheries.

perundang-undangan nasional dan standar HAM internasional dan instrumen internasional dimana sebuah negara adalah Pihak dari instrument internasional tersebut, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan konvensi yang relevan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Semua pihak harus berusaha untuk memastikan inklusi aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari pengelolaan perikanan serta inisiatif pembangunan.

- 6.13. Negara harus menghapuskan kerja paksa, mencegah utang-perbudakan wanita, pria dan anak-anak, dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi nelayan dan buruh nelayan, termasuk nelayan andon, dengan maksud untuk penghapusan kerja paksa secara menyeluruh di sektor perikanan, termasuk perikanan skala kecil.
- 6.14. Negara harus menyediakan dan memungkinkan akses ke sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan skala kecil dan yang dapat memfasilitasi pekerjaan yang layak dan menguntungkan bagi para pemuda, menghormati pilihan karir mereka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki dan perempuan.
- 6.15. Para pelaku perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya kesejahteraan anak-anak dan pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka sendiri dan masyarakat pada umumnya. Anak-anak harus pergi ke sekolah, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan memiliki semua hak-hak mereka yang dihormati sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.
- 6.16. Semua pihak harus mengakui kompleksitas permasalahan keselamatan di laut (dalam perikanan pedalaman dan laut) dan beberapa penyebab di balik kurangnya aspek keselamatan. Hal ini berlaku untuk semua kegiatan perikanan. Negara harus menjamin pengembangan, pemberlakuan dan penerapan hukum nasional yang tepat dan peraturan yang konsisten dengan pedoman internasional dari FAO, ILO dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk kerja di penangkapan ikan dan keselamatan laut bagi perikanan skala kecil.

- 6.17. States should recognize that improved sea safety, which includes occupational health and safety, in small-scale fisheries (inland and marine) will best be achieved through the development and implementation of coherent and integrated national strategies, with the active participation of the fishers themselves and with elements of regional coordination, as appropriate. Further, safety at sea of small-scale fishers should also be integrated into the general management of fisheries. States should provide support to, among other things, maintenance of national accident reporting, provision of sea safety awareness programmes and introduction of appropriate legislation for sea safety in small-scale fisheries. The role of existing institutions and community-based structures for increasing compliance, data collection, training and awareness, and search and rescue operations should be recognized in this process. States should promote access to information and to emergency location systems for rescue at sea for small-scale vessels.
- 6.18. All parties should protect the human rights and dignity of small-scale fisheries stakeholders in situations of occupation to allow them to pursue their traditional livelihoods, to have access to customary fishing grounds and to preserve their culture and way of life. Their effective participation in decision-making on matters that affect them should be facilitated.

7. VALUE CHAINS, POST-HARVEST AND TRADE

- 7.1. All parties should recognize the central role that the small-scale fisheries post-harvest subsector and its actors play in the value chain. All parties should ensure that post-harvest actors are part of relevant decision-making, recognizing that there are sometimes unequal power relationships between value chain actors and that vulnerable and marginalized groups may require special support.
- 7.2. All parties should recognize the role women often play in the post-harvest subsector and support improvements to facilitate women's

- 6.17. Negara harus mengakui bahwa perbaikan aspek keselamatan melaut, yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, perikanan skala kecil (pedalaman dan lautan) akan dapat dicapai melalui pengembangan dan pelaksanaan strategi nasional yang koheren dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari nelayan itu sendiri dan dengan unsur-unsur koordinasi regional, yang teapt. Selanjutnya, keselamatan nelayan skala kecil di laut juga harus diintegrasikan ke dalam manajemen umum perikanan. Negara harus memberikan dukungan, antara lain, pemeliharaan pelaporan kecelakaan nasional, penyediaan program kesadaran keamanan laut dan pengenalan undang-undang yang sesuai untuk keselamatan melaut bagi perikanan skala kecil. Peran lembaga-lembaga yang ada dan struktur berbasis masyarakat untuk peningkatan kepatuhan, pengumpulan data, pelatihan dan peningkatan kepedulian, dan pencarian dan operasi penyelamatan harus diakui dalam proses ini. Negara harus mendorong akses informasi dan sistem lokasi darurat untuk penyelamatan di laut untuk kapal-kapal skala kecil.
- 6.18. Semua pihak harus melindungi HAM dan martabat para pemangku kepentingan perikanan skala kecil dalam situasi okupasi untuk memungkinkan mereka memperoleh mata pencaharian tradisional mereka, untuk memiliki akses pada daerah penangkapan ikan adat dan melestarikan budaya dan cara hidup mereka. Partisipasi efektif mereka dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka harus difasilitasi.

7. RANTAI NILAI, PASCA PANEN DAN PERDAGANGAN

- 7.1. Semua pihak harus mengakui peran sentral subsektor pasca panen perikanan skala kecil dan para pelakunya di dalam rantai nilai. Semua pihak harus menjamin bahwa para pelaku pasca panen merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang relevan, mengakui bahwa terkadang terdapat hubungan kekuasaan yang tidak berimbang antara pelaku rantai nilai dan bahwa kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan yang memerlukan dukungan khusus.
- 7.2. Semua pihak harus mengakui peran perempuan dalam subsektor pasca panen dan mendukung perbaikan-perbaikan untuk

participation in work. States should ensure that amenities and services appropriate for women are available as required in order to enable women to retain and enhance their livelihoods in the post-harvest subsector.

- 7.3. States should foster, provide and enable investments in appropriate infrastructures organizational structures and capacity development to support the small-scale fisheries postharvest subsector in producing good quality and safe fish and fishery products, for both export and domestic markets, in a responsible and sustainable manner.
- 7.4. States and development partners should recognize the traditional forms of associations of fishers and fish workers and promote their adequate organizational and capacity development in all stages of the value chain in order to enhance their income and livelihood security in accordance with national legislation. Accordingly, there should be support for the setting up and the development of cooperatives, professional organizations of the small-scale fisheries sector and other organizational structures, as well as marketing mechanisms, e.g. auctions, as appropriate.
- 7.5. All parties should avoid post-harvest losses and waste and seek ways to create value addition, building also on existing traditional and local cost-efficient technologies, local innovations and culturally appropriate technology transfers. Environmentally sustainable practices within an ecosystem approach should be promoted, deterring, for example, waste of inputs (water, fuelwood, etc.) in small-scale fish handling and processing.
- 7.6. States should facilitate access to local, national, regional and international markets and promote equitable and non-discriminatory trade for small-scale fisheries products. States should work together to introduce trade regulations and procedures that in particular support regional trade in products from small-scale fisheries and taking into account the agreements under the World Trade Organization (WTO), bearing in mind the rights and obligations of WTO members where appropriate.

memfasilitasi partisipasi perempuan dalam kerja. Negara harus menjamin fasilitas dan layanan yang sesuai untuk perempuan adalah tersedia sebagaimana diperlukan agar perempuan dapat mempertahankan dan meningkatkan mata pencaharian mereka di subsektor pasca panen.

- 7.3. Negara harus mendorong, menyediakan dan memungkinkan investasi dalam infrastruktur yang sesuai struktur organisasi dan pengembangan kapasitas untuk mendukung sub sektor pasca panen perikanan skala kecil dalam menghasilkan kualitas yang baik dan ikan dan produk perikanan yang baik, untuk ekspor maupu pasar domestik, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 7.4. Negara dan mitra pembangunan harus mengakui bentuk-bentuk tradisional dari asosiasi nelayan dan buruh nelayan dan mendorong pengembangan organisasi dan kapasitas yang memadai dalam semua tahapan rantai nilai agar meningkatkan pendapatan dan jaminan mata pencaharian mereka sesuai dengan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, harus ada dukungan untuk pembentukan dan pengembangan koperasi, organisasi profesional sektor perikanan skala kecil dan struktur organisasi lainnya, serta mekanisme pemasaran, misalnya lelang, yang sesuai.
- 7.5. Semua pihak harus menghindari kerugian dan pemborosan pasca panen dan mencari cara untuk menciptakan nilai tambah, jug a membangun teknologi-teknologi tradisional dan lokal yang sudah ada yang hemat biaya, inovasi lokal dan transfer teknologi sesuai dengan budaya. Praktek-praktek lingkungan yang berkelanjutan dalam pendekatan ekosistem harus didukung, misalnya, penanganan limbah (air, kayu bakar, dll) dan pengolahan ikan skala kecil.
- 7.6. Negara harus menyediakan akses ke pasar-pasar lokal, nasional, regional dan internasional serta mendorong perdagangan yang adil dan non-diskriminatif bagi produk perikanan skala kecil. Negara harus bekerja sama untuk memperkenalkan peraturan dan prosedur perdagangan yang secara khusus mendukung perdagangan regional produk-produk dari perikanan skala kecil dan dengan mempertimbangkan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan menimbang hak dan kewajiban negara-negara anggota WTO apabila sesuai.

- 7.7. States should give due consideration to the impact of international trade in fish and fishery products and of vertical integration on local small-scale fishers, fish workers and their communities. States should ensure that promotion of international fish trade and export production do not adversely affect the nutritional needs of people for whom fish is critical to a nutritious diet, their health and well-being and for whom other comparable sources of food are not readily available or affordable.
- 7.8. States, small-scale fisheries actors and other value chain actors should recognize that benefits from international trade should be fairly distributed. States should ensure that effective fisheries management systems are in place to prevent overexploitation driven by market demand that can threaten the sustainability of fisheries resources, food security and nutrition. Such fisheries management systems should include responsible post-harvest practices, policies and actions to enable export income to benefit small-scale fishers and others in an equitable manner throughout the value chain.
- 7.9. States should adopt policies and procedures, including environmental, social and other relevant assessments, to ensure that adverse impacts by international trade on the environment, smallscale fisheries culture, livelihoods and special needs related to food security are equitably addressed. Consultation with concerned stakeholders should be part of these policies and procedures.
- 7.10. States should enable access to all relevant market and trade information for stakeholders in the small-scale fisheries value chain. Small-scale fisheries stakeholders must be able to access timely and accurate market information to help them adjust to changing market conditions. Capacity development is also required so that all small-scale fisheries stakeholders and especially women and vulnerable and marginalized groups can adapt to, and benefit equitably from,

- 7.7. Negara harus mempertimbangkan dampak perdagangan ikan dan produk perikanan internasional dan dampak dari integrasi vertikal bagi nelayan lokal skala kecil, buruh nelayan dan komunitas mereka. Negara harus menjamin bahwa promosi perdagangan ikan internasional dan ekspor produk tersebut tidak memberikan pengaruh negatif pada kebutuhan gizi bagi masyarakat yang kritis terhadap ikan sebagai sumber nutrisi, kesehatan dan kesejahteraan serta bagi masyarakat dimana sumber bahan pangan lainnya yang sebanding tidak tersedia atau terjangkau.
- 7.8. Negara, para pelaku perikanan skala kecil dan para pelaku rantai nilai lainnya harus mengakui bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional harus didistribusikan secara merata. Negara harus menjamin pelaksanaan sistem manajemen perikanan yang efektif sebagaimana mestinya untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang didorong oleh permintaan pasar yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan, ketahanan pangan dan gizi. Sistem manajemen perikanan tersebut harus mencakup praktek-praktek pasca panen, kebijakan dan tindakan yang bertanggung jawab untuk memungkinkan pendapatan ekspor yang menguntungkan bagi nelayan skala kecil secara adil di seluruh tahapan rantai nilai.
- 7.9. Negara harus mengadopsi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, termasuk yang terkait dengan lingkungan, sosial dan aspek-aspek lainnya yang relevan, untuk menjamin bahwa dampak negatif perdagangan internasional terhadap lingkungan, budaya perikanan skala kecil, mata pencaharian dan kebutuhan khusus yang terkait dengan ketahanan pangan dapat ditangani dengan baik. Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait harus menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur tersebut.
- 7.10. Negara harus memberikan akses terhadap semua informasi pasar dan perdagangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam rantai nilai perikanan skala kecil. Para pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus dapat mengakses informasi pasar yang tepat waktu dan akurat untuk membantu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Pengembangan kapasitas juga diperlukan sehingga semua pemangku kepentingan perikanan skala kecil serta khususnya perempuan dan kelompok rentan yang

opportunities of global market trends and local situations while minimizing any potential negative impacts.

8. GENDER EQUALITY

- 8.1. All parties should recognize that achieving gender equality requires concerted efforts by all and that gender mainstreaming should be an integral part of all small-scale fisheries development strategies. These strategies to achieve gender equality require different approaches in different cultural contexts and should challenge practices that are discriminatory against women.

- 8.2. States should comply with their obligations under international human rights law and implement the relevant instruments to which they are party, including, *inter alia*, CEDAW, and should bear in mind the Beijing Declaration and Platform of Action. States should endeavour to secure women's equal participation in decision-making processes for policies directed towards small-scale fisheries. States should adopt specific measures to address discrimination against women, while creating spaces for CSOs, in particular for women fish workers and their organizations, to participate in monitoring their implementation. Women should be encouraged to participate in fisheries organizations, and relevant organizational development support should be provided.

- 8.3. States should establish policies and legislation to realize gender equality and, as appropriate, adapt legislation, policies and measures that are not compatible with gender equality, taking into account social, economic and cultural aspects. States should be at the forefront of implementing actions for achieving gender equality by, *inter alia*, recruiting both men and women as extension staff and ensuring that both men and women have equal access to extension and technical services, including legal support, related to fisheries. All parties should TC-SSF/2014/213 collaborate to develop functional evaluation systems to assess the impact of legislation,

terpinggirkan dapat beradaptasi, dan mendapat keuntungan yang adil dari, peluang-peluang tren pasar global dan situasi lokal sambil meminimalkan setiap potensi dampak negatif.

8. KESETARAAN GENDER

- 8.1. Semua pihak harus mengakui bahwa pencapaian kesetaraan gender membutuhkan upaya bersama oleh semua pihak dan bahwa pemikiran mengenai penyetaran gender harus menjadi bagian integral dari semua strategi pengembangan perikanan skala kecil. Strategi-strategi untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan pendekatan yang berbeda dalam berbagai konteks budaya dan harus dapat mengatasi praktek-praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan
- 8.2. Negara harus memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum HAM internasional dan menerapkan instrumen yang relevan, termasuk, antara lain, CEDAW, serta Platform Rencana Aksi dan Dekrasi Beijing. Negara harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi kesetaraan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan yang diarahkan bagi perikanan skala kecil. Negara harus mengadopsi langkah-langkah khusus untuk mengatasi diskriminasi terhadap wanita, sekaligus menciptakan ruang bagi Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan dan organisasinya, untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaannya. Perempuan harus didorong untuk berpartisipasi dalam organisasi perikanan, dan dukungan pengembangan organisasi yang relevan harus disediakan.
- 8.3. Negara harus menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk mewujudkan kesetaraan gender dan, jika perlu, menyesuaikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Negara harus berada di garis depan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesetaraan gender dengan, antara lain, merekrut laki-laki dan perempuan sebagai petugas penyuluh dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan penyuluhan dan teknis, termasuk bantuan hukum, terkait dengan perikanan. Semua pihak

policies and actions for improving women's status and achieving gender equality.

- 8.4. All parties should encourage the development of better technologies of importance and appropriate to women's work in small-scale fisheries.

9. DISASTER RISKS AND CLIMATE CHANGE

- 9.1. States should recognize that combating climate change, including in the context of sustainable small-scale fisheries, requires urgent and ambitious action, in accordance with the objectives, principles and provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), taking into account the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) outcome document 'The future we want'.
- 9.2. All parties should recognize and take into account the differential impact of natural and human-induced disasters and climate change on small-scale fisheries. States should develop policies and plans to address climate change in fisheries, in particular strategies for adaptation and mitigation, where applicable, as well as for building resilience, in full and effective consultation with fishing communities including indigenous peoples, men and women, paying particular attention to vulnerable and marginalized groups. Special support should be given to small-scale fishing communities living on small islands where climate change may have particular implications for food security, nutrition, housing and livelihoods.
- 9.3. All parties should recognize the need for integrated and holistic approaches, including cross-sectoral collaboration, in order to address disaster risks and climate change in small-scale fisheries. States and other relevant parties should take steps to address issues such as pollution, coastal erosion and destruction of coastal habitats

harus bekerjasama untuk mengembangkan sistem evaluasi fungsional untuk menilai dampak dari undang-undang, kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan status perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

- 8.4. Semua pihak harus mendorong pengembangan teknologi yang lebih baik dan yang sesuai untuk perempuan yang bekerja dalam perikanan skala kecil.

9. RISIKO BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

- 9.1. Negara harus mengakui bahwa mengatasi perubahan iklim, termasuk dalam konteks perikanan skala kecil yang berkelanjutan, memerlukan tindakan mendesak, sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan mempertimbangkan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) sebagaimana tertera dalam dokumen ‘Masa Depan Yang Kita Inginkan’.
- 9.2. Semua pihak harus mengakui dan memperhitungkan perbedaan dampak bencana yang disebabkan alam dan manusia serta perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. Negara harus mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mengatasi perubahan iklim di perikanan, khususnya dalam strategi untuk adaptasi dan mitigasi, tergantung mana yang lebih diperlukan, serta untuk membangun ketahanan, dalam konsultasi penuh dan efektif dengan masyarakat nelayan termasuk masyarakat adat, lelaki dan perempuan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Dukungan khusus harus diberikan untuk masyarakat nelayan skala kecil yang tinggal di pulau-pulau kecil di mana perubahan iklim mungkin memiliki implikasi tertentu untuk keamanan pangan, gizi, perumahan dan mata pencaharian mereka
- 9.3. Semua pihak harus mengakui perlunya pendekatan terpadu dan holistik, termasuk kerjasama lintas sektor dalam rangka untuk mengatasi risiko bencana dan perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. Negara dan pihak terkait lainnya harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah seperti polusi, erosi

due to human-induced non-fisheries-related factors. Such concerns seriously undermine the livelihoods of fishing communities as well as their ability to adapt to possible impacts of climate change.

- 9.4. States should consider assisting and supporting small-scale fishing communities affected by climate change or natural and human-induced disasters, including through adaptation, mitigation and aid plans, where appropriate.
- 9.5. In case of disasters caused by humans, impacting small-scale fisheries, the responsible party should be held accountable.
- 9.6. All parties should take into account the impact that climate change and disasters may have on the post-harvest and trade subsector in the form of changes in fish species and quantities, fish quality and shelf-life, and implications with regard to market outlets. States should provide support to small-scale fisheries stakeholders with regard to adjustment measures in order to reduce negative impacts. When new technologies are introduced, they need to be flexible and adaptive to future changes in species, products and markets, and climatic variability.
- 9.7. States should understand how emergency response and disaster preparedness are related in small-scale fisheries and apply the concept of the relief-development continuum. Longer-term development objectives need to be considered throughout the emergency sequence, including in the immediate relief phase, and rehabilitation, reconstruction and recovery should include actions to reduce vulnerabilities to potential future threats. The concept of ‘building back better’ should be applied in disaster response and rehabilitation.
- 9.8. All parties should promote the role of small-scale fisheries in efforts related to climate change and should encourage and support energy efficiency in the subsector, including the whole value chain – fishing, post-harvest, marketing and distribution.

pantai dan perusakan habitat pesisir oleh manusia yang disebabkan faktor-faktor non-perikanan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan perikanan yang terkait dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kemungkinan dampak perubahan iklim.

- 9.4. Negara harus mempertimbangkan untuk membantu dan mendukung masyarakat nelayan skala kecil yang terkena dampak oleh perubahan iklim atau bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia, termasuk melalui adaptasi, mitigasi dan bantuan rencana.
- 9.5. Dalam kasus bencana yang disebabkan oleh manusia, pihak yang terkait harus bertanggung jawab.
- 9.6. Semua pihak harus memperhitungkan dampak perubahan iklim dan bencana yang mungkin terjadi pada sub sektor pasca-panen dan perdagangan dalam bentuk perubahan-perubahan spesies dan jumlah ikan, kualitas ikan dan mutu simpan, serta implikasi-implikasi yang berkaitan dengan outlet pasar. Negara harus menyediakan dukungan pada para pemangku kepentingan perikanan skala kecil berkaitan dengan langkah-langkah penyesuaian untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Ketika teknologi baru diperkenalkan, mereka harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan di masa depan atas jenis, produk dan pasar, serta keragaman iklim.
- 9.7. Negara harus memahami bagaimana tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana adalah terkait dalam perikanan skala kecil dan menerapkan konsep kelanjutan bantuan pengembangan. Tujuan pembangunan jangka panjang perlu mempertimbangkan seluruh urutan tanggap darurat, termasuk pada tahap bantuan segera, dan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan harus mencakup tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap potensi ancaman di masa depan. Konsep 'membangun kembali lebih baik' harus diterapkan dalam respon dan rehabilitasi bencana.
- 9.8. Semua pihak harus meningkatkan peran perikanan skala kecil dalam upaya yang terkait dengan perubahan iklim dan harus mendorong dan mendukung efisiensi energi di sub sektor perikanan, termasuk

- 9.9. States should consider making available to small-scale fishing communities transparent access to adaptation funds, facilities and/or culturally appropriate technologies for climate change adaptation, as appropriate.

PART 3: ENSURING AN ENABLING ENVIRONMENT AND SUPPORTING IMPLEMENTATION

10. POLICY COHERENCE, INSTITUTIONAL COORDINATION AND COLLABORATION

- 10.1. States should recognize the need for and work towards policy coherence with regard to, *inter alia*: national legislation; international human rights law; other international instruments, including those related to indigenous peoples; economic development policies; energy, education, health and rural policies; environmental protection; food security and nutrition policies; labour and employment policies; trade policies; disaster risk management (DRM) and climate change adaptation (CCA) policies; fisheries access arrangements; and other fisheries sector policies, plans, actions and investments in order to promote holistic development in small-scale fishing communities. Special attention should be paid to ensuring gender equity and equality.

- 10.2. States should, as appropriate, develop and use spatial planning approaches, including inland and marine spatial planning, that take due account of the small-scale fisheries interests and role in integrated coastal zone management. Through consultation, participation and publicizing, gender-sensitive policies and laws on regulated spatial planning should be developed as appropriate. Where appropriate, formal planning systems should consider methods of planning and territorial development used by small-scale fishing and other communities with customary tenure systems, and decision-making processes within those communities.

seluruh rantai nilai - penangkapan, pasca panen, pemasaran dan distribusi.

- 9.9. Negara harus memastikan ketersediaan akses yang transparan bagi masyarakat nelayan skala kecil atas pinjaman dana, fasilitas dan/atau teknologi yang sesuai dengan budaya untuk adaptasi perubahan iklim, secara tepat.

BAGIAN 3: MEMASTIKAN LINGKUNGAN PENUNJANG DAN MENDUKUNG PELAKSANAAN

10. KEBIJAKAN YANG KOHERAN, KOLABORASI DAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

- 10.1. Negara harus mengakui kebutuhan dan bekerja menuju kebijakan yang koheran berkaitan dengan, antara lain: perundang-undangan nasional; hukum HAM internasional; instrumen internasional lainnya, termasuk yang terkait dengan masyarakat adat; kebijakan pembangunan ekonomi; energi, pendidikan, kesehatan dan kebijakan pedesaan; perlindungan lingkungan; ketahanan pangan dan gizi; tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan; kebijakan perdagangan; manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; pengaturan kebijakan sektor perikanan; rencana, tindakan dan investasi dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan menyeluruh dalam masyarakat nelayan skala kecil. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan kesetaraan dan kesepadan gender.
- 10.2. Negara harus, selayaknya, mengembangkan dan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan tata ruang, termasuk perencanaan tata ruang pedalaman dan lautan, yang benar-benar memperhitungkan kepentingan dan peranan perikanan skala kecil dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Melalui konsultasi, partisipasi dan publikasi, perundangan dan kebijakan peka gender mengenai perencanaan tata ruang teregulasi harus dikembangkan selayaknya. Jika diperlukan, sistem perencanaan formal harus mempertimbangkan metode-metode perencanaan dan pengembangan wilayah yang digunakan oleh nelayan skala kecil dan masyarakat lainnya dengan sistem-sistem kepemilikan adat,

- 10.3. States should adopt specific policy measures to ensure the harmonization of policies affecting the health of marine and inland waterbodies and ecosystems and to ensure that fisheries, agriculture and other natural-resource policies collectively enhance the interrelated livelihoods derived from these sectors.
- 10.4. States should ensure that fisheries policy provides a long-term vision for sustainable small-scale fisheries and the eradication of hunger and poverty, using an ecosystem approach. The overall policy framework for fisheries should be coherent with the long-term vision and policy framework for small-scale fisheries and human rights, paying particular attention to vulnerable and marginalized people.
- 10.5. States should establish and promote the institutional structures and linkages – including local– national–regional–global linkages and networks – necessary for achieving policy coherence, cross-sectoral collaboration and the implementation of holistic and inclusive ecosystem approaches in the fisheries sector. At the same time, there is a need for clear responsibilities and there should be well-defined points of contact in government authorities and agencies for smallscale fishing communities.
- 10.6. Small-scale fisheries stakeholders should promote collaboration among their professional associations, including fisheries cooperatives and CSOs. They should establish networks and platforms for the exchange of experiences and information and to facilitate their involvement in policy- and decision-making processes relevant to small-scale fisheries communities.
- 10.7. States should recognize, and promote as appropriate, that local governance structures may contribute to an effective management of

dan proses-proses pengambilan keputusan dalam komunitas-komunitas tersebut.

- 10.3. Negara harus mengadopsi langkah-langkah kebijakan khusus untuk menjamin harmonisasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisi lingkungan perairan dan ekosistem lautan dan pedalaman dan untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan perikanan, pertanian dan sumber daya alam lainnya secara kolektif meningkatkan mata pencaharian yang saling terkait dari sektor-sektor tersebut.
- 10.4. Negara harus menjamin bahwa kebijakan perikanan memiliki visi jangka panjang untuk perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan, dengan menggunakan sebuah pendekatan ekosistem. Keseluruhan kerangka kebijakan perikanan harus koheren dengan kerangka kebijakan dan visi jangka panjang perikanan skala kecil dan HAM, dengan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
- 10.5. Negara harus mendirikan dan mendorong struktur-struktur dan hubungan-hubungan kelembagaan – termasuk hubungan dan jejaring lokal-nasional-regional-global – yang diperlukan untuk mencapai koherensi kebijakan, kolaborasi lintas-sektoral dan implementasi pendekatan-pendekatan ekosistem yang holistik dan inklusif di sektor perikanan. Disaat yang sama, ada sebuah kebutuhan tanggung jawab yang jelas dan kontak poin yang harus ditetapkan dalam lembaga-lembaga dan badan-badan pemeritahan untuk komunitas-komunitas nelayan skala kecil.
- 10.6. Para pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus mendorong kolaborasi diantara asosiasi-asosiasi profesional mereka, termasuk koperasi perikanan dan Organisasi Masyarakat Sipil. Mereka harus membangun jejaring dan platform untuk pertukaran pengalaman dan informasi dan untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang relevan bagi masyarakat perikanan skala kecil.
- 10.7. Negara harus mengakui, dan mempromosikan selayaknya, bahwa struktur-struktur tata kelola lokal dapat berkontribusi pada manajemen yang efektif dari perikanan skala kecil, dengan

small-scale fisheries, taking into account the ecosystem approach and in accordance with national law.

- 10.8. States should promote enhanced international, regional and subregional cooperation in securing sustainable small-scale fisheries. States, as well as international, regional and subregional organizations, as appropriate, should support capacity development to enhance the understanding of small-scale fisheries and assist the subsector in matters that require subregional, regional or international collaboration, including appropriate and mutually agreed technology transfer

11. INFORMATION, RESEARCH AND COMMUNICATION

- 11.1. States should establish systems of collecting fisheries data, including bioecological, social, cultural and economic data relevant for decision-making on sustainable management of smallscale fisheries with a view to ensuring sustainability of ecosystems, including fish stocks, in a transparent manner. Efforts should be made to also produce gender-disaggregated data in official statistics, as well as data allowing for an improved understanding and visibility of the importance of small-scale fisheries and its different components, including socio-economic aspects.
- 11.2. All stakeholders and small-scale fisheries communities should recognize the importance of communication and information, which are necessary for effective decision-making.
- 11.3. States should endeavour to prevent corruption, particularly through increasing transparency, holding decision-makers accountable, and ensuring that impartial decisions are delivered promptly and through appropriate participation and communication with small-scale fishing communities.
- 11.4. All parties should recognize small-scale fishing communities as holders, providers and receivers of knowledge. It is particularly important to understand the need for access to appropriate

mempertimbangkan pendekatan ekosistem dan sesuai dengan hukum nasional.

- 10.8. Negara harus meningkatkan kerjasama sub regional, regional dan internasional dalam menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Negara, maupun organisasi-organisasi sub regional, regional dan internasional, sebagaimana mestinya, harus mendukung pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman perikanan skala kecil dan membantu sub sektor tersebut dalam hal-hal yang memerlukan bantuan kerjasama sub regional, regional atau internasional, termasuk transfer teknologi yang tepat, saling menguntungkan dan disepakati bersama.

11. INFORMASI, PENELITIAN DAN KOMUNIKASI

- 11.1. Negara harus membangun sistem pengumpulan data perikanan, termasuk data-data bio-ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang relevan untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan yang berkelanjutan dari perikanan skala kecil dengan maksud untuk menjamin keberlanjutan ekosistem, termasuk stok ikan, secara transparan. Upaya-upaya harus dilakukan juga untuk mendapatkan data pemilahan gender dalam statistik resmi, serta data yang memungkinkan untuk sebuah pemahaman dan visibilitas yang lebih baik terhadap pentingnya perikanan skala kecil dan komponen-komponennya yang berbeda, termasuk aspek sosial-ekonomi.
- 11.2. Semua pemangku kepentingan dan masyarakat perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya komunikasi dan informasi, yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif.
- 11.3. Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi, secara khusus melalui meningkatkan transparansi, menjaga akuntabilitas para pengambil keputusan, dan menjamin bahwa keputusan-keputusan yang tidak memihak disampaikan segera dan melalui partisipasi dan komunikasi yang layak dengan masyarakat perikanan skala kecil.
- 11.4. Semua pihak harus mengakui masyarakat nelayan skala kecil sebagai pemegang, penyedia dan penerima pengetahuan. Hal ini sangatlah penting untuk memahami kebutuhan untuk akses pada informasi yang tepat oleh masyarakat nelayan skala kecil dan

information by small-scale fishing communities and their organizations in order to help them cope with existing problems and empower them to improve their livelihoods. These information requirements depend on current issues facing communities and concern the biological, legal, economic, social and cultural aspects of fisheries and livelihoods.

- 11.5. States should ensure that the information necessary for responsible small-scale fisheries and sustainable development is available, including on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. It should relate to, *inter alia*, disaster risks, climate change, livelihoods and food security with particular attention to the situation of vulnerable and marginalized groups. Information systems with low data requirements should be developed for data-poor situations.
- 11.6. All parties should ensure that the knowledge, culture, traditions and practices of small-scale fishing communities, including indigenous peoples, are recognized and, as appropriate, supported, and that they inform responsible local governance and sustainable development processes. The specific knowledge of women fishers and fish workers must be recognized and supported. States should investigate and document traditional fisheries knowledge and technologies in order to assess their application to sustainable fisheries conservation, management and development.
- 11.7. States and other relevant parties should provide support to small-scale fishing communities, in particular to indigenous peoples, women and those that rely on fishing for subsistence, including, as appropriate, the technical and financial assistance to organize, maintain, exchange and improve traditional knowledge of aquatic living resources and fishing techniques, and upgrade knowledge on aquatic ecosystems.
- 11.8. All parties should promote the availability, flow and exchange of information, including on aquatic transboundary resources, through

organisasi mereka dalam rangka membantu mereka mengatasi permasalahan yang ada dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan informasi ini tergantung pada isu-isu yang dihadapi masyarakat dan perhatian atas aspek-aspek biologi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya perikanan dan mata pencaharian.

- 11.5. Negara harus menjamin bahwa informasi yang diperlukan untuk pembangunan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tersedia, termasuk informasi penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Informasi tersebut harus berhubungan dengan, antara lain, risiko bencana, perubahan iklim, mata pencaharian dan ketahanan pangan dengan perhatian khusus pada situasi kelompok-keompok yang rentan dan terpinggirkan. Sistem informasi dengan persyaratan yang mudah harus dikembangkan pada situasi-situasi miskin data.
- 11.6. Semua pihak harus menjamin bahwa pengetahuan, budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat nelayan skala kecil, termasuk masyarakat adat, adalah diakui dan, jika perlu, didukung, dan bahwa mereka menginformasikan proses-proses tata kelola lokal yang bertanggungjawab dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengetahuan yang khusus dari perempuan nelayan dan buruh nelayan harus diakui dan didukung. Negara harus menyelidiki dan mendokumentasikan pengetahuan dan teknologi-teknologi perikanan tradisional untuk menilai penerapannya pada pembangunan, pengelolaan dan konservasi perikanan yang berkelanjutan
- 11.7. Negara dan pihak terkait lainnya harus memberikan dukungan kepada masyarakat nelayan skala kecil, khususnya masyarakat adat, perempuan dan orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dari sektor perikanan, termasuk, jika perlu, bantuan teknis dan finansial dalam mengatur, mengelola, mempertukarkan dan meningkatkan pengetahuan tradisional sumber daya perairan dan teknik-teknik penangkapan ikan, dan meningkatkan pengetahuan tentang ekosistem perairan.
- 11.8. Semua pihak harus meningkatkan ketersediaan informasi, aliran dan pertukaran informasi, termasuk tentang sumber daya perairan lintas

the establishment or use of appropriate existing platforms and networks at community, national, subregional and regional level, including both horizontal and vertical two-way information flows. Taking into account the social and cultural dimensions, appropriate approaches, tools and media should be used for communication with and capacity development for small-scale fishing communities.

- 11.9. States and other parties should, to the extent possible, ensure that funds are available for smallscale fisheries research, and collaborative and participatory data collection, analyses and research should be encouraged. States and other parties should endeavour to integrate this research knowledge into their decision-making processes. Research organizations and institutions should support capacity development to allow small-scale fishing communities to participate in research and in the utilization of research findings. Research priorities should be agreed upon through a consultative process focusing on the role of small-scale fisheries in sustainable resource utilization, food security and nutrition, poverty eradication, and equitable development, including also DRM and CCA considerations.
- 11.10. States and other relevant parties should promote research into the conditions of work, including migrant fishers and fish workers, health, education, decision-making, etc. in the context of gender relations, in order to inform strategies for ensuring equitable benefits for men and women in fisheries. Efforts to mainstream gender should include the use of gender analysis in the design phase of policies, programmes and projects for small-scale fisheries in order to design gender-sensitive interventions. Gender-sensitive indicators should be used to monitor and address gender inequalities and to capture how interventions have contributed towards social change.
- 11.11. Recognizing the role of small-scale fisheries in seafood production, States and other parties should promote the consumption of fish and fishery products within consumer education programmes in order to

batas, melalui pembentukan atau penggunaan platform dan jejaring yang sesuai yang sudah ada di masyarakat, nasional, sub regional dan tingkat regional, termasuk arus informasi dua arah horisontal dan vertikal. Dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya, pendekatan-pendekatan yang tepat, alat-alat dan media harus digunakan untuk komunikasi dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat nelayan skala kecil.

- 11.9. Negara dan pihak terkait lainnya harus, sejauh mungkin, menjamin ketersediaan dana untuk penelitian perikanan skala kecil, dan pengumpulan data partisipatif dan kolaboratif, analisis dan penelitian harus didorong. Negara dan pihak-pihak lainnya harus berusaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian kedalam proses-proses pengambilan keputusan. Organisasi dan lembaga penelitian harus mendukung pengembangan kapasitas untuk memungkinkan nelayan skala kecil berpartisipasi dalam penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Prioritas penelitian harus disepakati melalui proses konsultatif yang berfokus pada peranan perikanan skala kecil dalam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya, ketahanan pangan dan gizi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan yang adil, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan DRM dan CCA.
- 11.10. Negara dan pihak-pihak terkait lainnya harus mendorong penelitian didalam kondisi-kondisi kerja, termasuk nelayan andon, buruh nelayan, kesehatan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan lain-lain dalam konteks hubungan gender, agar memberikan informasi yang strategis untuk menjamin manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan perikanan. Upaya-upaya untuk mengarus-utamakan gender harus mencakup penggunaan analisis gender dalam tahapan desain kebijakan, program dan proyek-proyek perikanan skala kecil dalam rangka merancang intervensi-intervensi yang peka gender. Indikator-indikator peka gender harus digunakan untuk memantau dan mengatasi kesenjangan gender dan untuk mengetahui bagaimana intervensi-intervensi telah memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial.
- 11.11. Pengakuan peranan perikanan skala kecil dalam produksi makanan laut, negara dan pihak-pihak lainnya harus mendorong konsumsi ikan dan produk perikanan didalam program-program pendidikan konsumen agar meningkatkan kepedulian akan manfaat gizi yang

increase awareness of the nutritional benefits of eating fish and impart knowledge on how to assess fish and fishery product quality.

12. CAPACITY DEVELOPMENT

- 12.1. States and other parties should enhance the capacity of small-scale fishing communities in order to enable them to participate in decision-making processes. To this effect, it should be ensured that the range and diversity of the small-scale fisheries subsector along the entire value chain is appropriately represented through the creation of legitimate, democratic and representative structures. Specific attention should be paid to the need to work towards the equitable participation of women in such structures. Where appropriate and necessary, separate spaces and mechanisms should be provided to enable women to organize autonomously at various levels on issues of particular relevance to them.
- 12.2. States and other stakeholders should provide capacity building, for example through development programmes, to allow small-scale fisheries to benefit from market opportunities.
- 12.3. All parties should recognize that capacity development should build on existing knowledge and skills and be a two-way process of knowledge transfer, providing for flexible and suitable learning pathways to meet the needs of individuals, including both men and women and vulnerable and marginalized groups. Moreover, capacity development should include building the resilience and adaptive capacity of small-scale fishing communities in relation to DRM and CCA.
- 12.4. Government authorities and agencies at all levels should work to develop knowledge and skills to support sustainable small-scale fisheries development and successful co-management arrangements, as appropriate. Particular attention should be given to decentralized and local government structures directly involved in governance and

diperoleh dari mengonsumsi ikan dan memberikan pengetahuan bagaimana menilai kualitas ikan dan produk perikanan.

12. PENGEMBANGAN KAPASITAS

- 12.1. Negara dan pihak-pihak lainnya harus meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan skala kecil untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjalankannya, harus dipastikan bahwa jangkauan dan keragaman sub sektor perikanan skala kecil sepanjang keseluruhan rantai nilainya adalah secara tepat direpresentasikan melalui penciptaan yang sah, demokratis dan dalam struktur-struktur yang representatif. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan untuk bekerja menuju partisipasi perempuan yang setara dalam struktur tersebut. Jika diperlukan, mekanisme-mekanisme dan ruang-ruang yang terpisah harus disediakan untuk memungkinkan perempuan mengelola secara mandiri terhadap isu-isu yang terkait dengan mereka.
- 12.2. Negara dan para pemangku kepentingan lainnya harus menyediakan peningkatan kapasitas, misalnya melalui program-program pembangunan, untuk memungkinkan perikanan skala kecil mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang pasar.
- 12.3. Semua pihak harus mengakui bahwa pengembangan kapasitas harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini dan merupakan proses transfer pengetahuan dua arah, untuk memenuhi kebutuhan individu, termasuk laki-laki dan perempuan dan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Selain itu, pengembangan kapasitas harus mencakup peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptasi masyarakat nelayan skala kecil dalam kaitannya dengan DRM dan CCA.
- 12.4. Lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah di semua tingkatan harus bekerja untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pengembangan perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan pengaturan manajemen yang sukses sebagaimana mestinya. Perhatian khusus harus diberikan kepada

development processes together with small-scale fishing communities, including the area of research.

13. IMPLEMENTATION SUPPORT, MONITORING AND EVALUATION

- 13.1. All parties are encouraged to implement these Guidelines in accordance with national priorities and circumstances.
- 13.2. States and all other parties should promote aid effectiveness and responsible use of financial resources. Development partners, specialized Agencies of the United Nations, and regional organizations are encouraged to support voluntary efforts by States to implement these Guidelines, including through South–South cooperation. Such support could include technical cooperation, financial assistance, institutional capacity development, knowledge sharing and exchange of experiences, assistance in developing national small-scale fisheries policies and transfer of technology.
- 13.3. States and all other parties should work together to create awareness of the Guidelines, also by disseminating simplified and translated versions for the benefit of those working in small-scale fisheries. States and all other parties should develop a specific set of materials on gender to secure the effective dissemination of information on gender and women’s role in small-scale fisheries and to highlight steps that need to be taken to improve women’s status and their work.
- 13.4. States should recognize the importance of monitoring systems that allow their institutions to assess progress towards implementation of the objectives and recommendations in these Guidelines. Assessments of the impact on the enjoyment of the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security and on poverty eradication should be included. Mechanisms allowing the results of monitoring to feed back into

desentralisasi dan struktur pemerintah lokal yang secara langsung terlibat dalam tata kelola dan proses pembangunan bersama-sama dengan masyarakat nelayan skala kecil.

13. DUKUNGAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 13.1. Semua pihak didorong untuk menerapkan Petunjuk ini sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional.
- 13.2. Negara dan semua pihak lainnya harus meningkatkan efektivitas bantuan dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya finansial. Mitra pembangunan, lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional didorong untuk mendukung upaya-upaya sukarela oleh negara untuk melaksanakan Petunjuk ini, termasuk melalui kerjasama Selatan-Selatan. Dukungan tersebut dapat mencakup kerjasama teknis, bantuan keuangan, pengembangan kapasitas kelembagaan, berbagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman, bantuan dalam mengembangkan kebijakan perikanan skala kecil nasional serta transfer teknologi.
- 13.3. Negara dan semua pihak lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan kepedulian tentang Petunjuk ini, juga untuk menyebarkan versi-versi yang disederhanakan dan diterjemahkan untuk kepentingan mereka yang bekerja di perikanan skala kecil. Negara dan semua pihak lainnya harus mengembangkan satu set khusus materi tentang gender untuk menjamin penyebaran informasi yang efektif tentang gender dan peranan perempuan dalam perikanan skala kecil serta untuk menyoroti langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan status perempuan dan pekerjaan mereka.
- 13.4. Negara harus mengakui pentingnya sistem pemantauan yang memungkinkan lembaga-lembaga mereka untuk menilai kemajuan terhadap pelaksanaan dari tujuan-tujuan dan rekomendasi dalam Petunjuk ini. Penilaian-penilaian atas dampak pelaksanaan realisasi progresif dari hak atas kecukupan pangan dalam konteks ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan harus disertakan. Mekanisme-mekanisme yang memungkinkan hasil-hasil

policy formulation and implementation should be included. Gender should be taken into consideration in monitoring by using gender-sensitive approaches, indicators and data. States and all parties should elaborate participatory assessment methodologies that allow a better understanding and documentation of the true contribution of small-scale fisheries to sustainable resource management for food security and poverty eradication including both men and women.

- 13.5. States should facilitate the formation of national-level platforms, with cross-sectoral representation and with strong representation of CSOs, to oversee implementation of the Guidelines, as appropriate. Legitimate representatives of small-scale fishing communities should be involved both in the development and application of implementation strategies for the Guidelines and in monitoring.
- 13.6. FAO should promote and support the development of a Global Assistance Programme, with regional plans of action to support the implementation of these Guidelines.

pemantauan yang dapat memberikan umpan balik dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan juga harus disertakan. Aspek gender harus dipertimbangkan dalam pemantauan dengan menggunakan data, indikator dan pendekatan-pendekatan peka gender. Negara dan semua pihak harus menjabarkan metodologi-metodologi penilaian partisipatif yang memungkinkan sebuah pemahaman dan dokumentasi yang lebih baik atas kontribusi sebenarnya dari perikanan skala kecil untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan termasuk baik laki-laki dan perempuan .

- 13.5. Negara harus memfasilitasi pembentukan platform tingkat nasional, dengan representasi lintas sektoral dan dengan representasi yang kuat dari Organisasi Masyarakat Sipil, untuk mengawasi pelaksanaan Petunjuk ini sebagaimana mestinya. Perwakilan-perwakilan yang sah dari masyarakat nelayan skala kecil harus dilibatkan, baik dalam pengembangan dan penerapan strategi peimplementasian Petunjuk ini maupun dalam pemantauannya.
- 13.6. FAO harus mendorong dan mendukung pengembangan Program Bantuan Global, dengan rencana-rencana aksi regional untuk mendukung pelaksanaan Petunjuk ini.

The *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the context of Food Security and Poverty Eradication* (the 'Guidelines') was published by The Food and Agriculture Organization of the United Nations in 2015. This is a Bahasa translation of the Summary of the Guidelines prepared and arranged by the International Collective in Support of Fish Workers (ICSF) (the Summary). Neither the Summary nor the Bahasa translation were commissioned by FAO, and in the event of any discrepancies, the original Guidelines will govern.



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta Pusat**

2014 ©